

I n f l a s i

Suseno
Siti Astiyah



Seri Kebanksentralan ini diterbitkan oleh:
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)

BANK INDONESIA

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Gd. B Lt. 20, Jakarta 10350
No. Telepon: 021-3817321, No. Fax: 021-3501912
e-mail: ppsk@bi.go.id

Penulis adalah peneliti pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan-Bank Indonesia
Isi dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis

I n f l a s i

Suseno
Siti Astiyah

PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK)
BANK INDONESIA

Jakarta, Maret 2009

Suseno

Inflasi / Suseno, Siti Astiyah. -- Jakarta :
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
(PPSK) BI, 2009.

i-vi; 57 hlm.; 15,5 cm x 23 cm. - (Seri
Kebanksentralan; 22)

Bibliografi: hlm. - 55

Sambutan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia, kembali menerbitkan buku seri kebankentralan. Penerbitan buku ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan sebagaimana diamandemen dalam Undang-Undang No.3 tahun 2004, yaitu dalam rangka meningkatkan transparansi kepada masyarakat luas.

Ruang lingkup buku seri kebankentralan mengenai inflasi ini membahas aspek teori inflasi serta konsep, metodologi, dan penerapan inflasi terutama keterkaitannya dengan kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia, PPSK, berupaya menuangkan bahasan materi buku seri kebankentralan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat.

Kami berharap penerbitan buku seri kebankentralan ini dapat memperkaya khazanah ilmu kebankentralan. Akhirnya, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penerbitan buku ini. Kami mengharapkan saran dari berbagai pihak guna perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini bermanfaat dan selamat membaca.

Jakarta, Januari 2009

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan



Rizal A. Djaafara

Direktur

Pengantar

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian berbagai pihak. Inflasi tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian dunia usaha, bank sentral, dan pemerintah. Inflasi dapat berpengaruh terhadap masyarakat dan perekonomian suatu negara. Bagi masyarakat umum, inflasi menjadi perhatian karena inflasi langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup, dan bagi dunia usaha laju inflasi merupakan faktor yang sangat penting dalam membuat berbagai keputusan. Inflasi juga menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pengaruhnya yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, maka setiap negara, melalui otoritas moneter atau bank sentral, senantiasa berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi agar tetap rendah dan stabil. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga yang mendapat mandat dari undang-undang untuk mengendalikan laju inflasi.

Buku Seri Kebanksentralan (BSK) ini merupakan tulisan singkat dengan maksud menjelaskan tentang inflasi. Dalam tulisan ini akan dibahas pengertian tentang inflasi, teori tentang terjadinya inflasi, dampak inflasi, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi. Selanjutnya, juga akan diuraikan tentang inflasi di Indonesia yang antara lain mencakup perhitungan inflasi, perkembangan inflasi, faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, dan pengendalian inflasi di Indonesia.

Semoga buku kecil ini bermanfaat.

Jakarta, November 2008

Penulis

Daftar Isi

Sambutan	iii
Pengantar	vi
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Gambaran Umum	2
Pengertian Inflasi	2
Penghitungan Inflasi	4
Teori tentang Inflasi	7
Faktor-faktor yang menyebabkan Inflasi	11
Dampak Inflasi	17
Pengendalian Inflasi	21
Inflasi di Indonesia	25
Penghitungan Laju Inflasi di Indonesia	25
Perkembangan Inflasi di Indonesia	31
Faktor-faktor penyebab Inflasi di Indonesia	39
Pengendalian Inflasi di Indonesia	42
Inflasi Daerah	48
Karakteristik Inflasi Daerah	48
Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia	50
Daftar Pustaka	55

Daftar Tabel, Grafik & Diagram

Daftar Tabel

Tabel 1 : Keranjang IHK	27
Tabel 2 : Struktur IHK	28
Tabel 3 : Bobot Penimbang Kota	24
Tabel 4 : Indeks Harga Bahan Makanan Indonesia, 1953-1965	33
Tabel 5 : Inflasi 34 kota, 2004 - 2007	49

Daftar Grafik

Grafik 1: Permintaan dan Penawaran	12
Grafik 2: Inflasi Indonesia 1967-1970	34
Grafik 3: Laju Inflasi <i>yoy</i> di Indonesia, 1971-1997	36
Grafik 4: Laju Inflasi <i>yoy</i> di Indonesia, 1998-2008	37
Grafik 5: IHK, <i>Core</i> , <i>Administered prices</i> , dan <i>Volatile food</i>	38
Grafik 6: Rata-rata Inflasi 34 kota	49

Daftar Diagram

Diagram 1 : Kerangka Kerja Kebijakan Moneter	23
Diagram 2 : Pengendalian Inflasi daerah	51

Pendahuluan

Banyak orang merasakan bahwa harga barang dan jasa kebutuhan pokok pada saat ini lebih mahal dibandingkan dengan harga barang dan jasa tersebut pada satu atau dua tahun yang lalu. Bahkan bagi sebagian masyarakat kenaikan harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari tersebut telah menjadi beban hidup yang sangat berat. Protes dan keluhan masyarakat yang disampaikan dalam berbagai demonstrasi apabila Pemerintah merencanakan menaikkan harga bahan bakar atau tarif dasar listrik, antara lain merupakan bentuk ketidaksukaan masyarakat terhadap kenaikan harga-harga sebagai akibat rencana tersebut. Kenaikan harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari dari waktu ke waktu tersebut disebabkan adanya apa yang disebut sebagai inflasi.

Inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang tinggi akan menjadi beban oleh banyak pihak. Dengan inflasi, maka daya beli suatu mata uang menjadi lebih rendah atau menurun. Dengan menurunnya daya beli mata uang, maka kemampuan masyarakat berpendapatan tetap dalam membeli barang dan jasa kebutuhan sehari-hari akan menjadi semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil juga menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, tidak mendorong masyarakat untuk menabung, dan berbagai dampak negatif lain yang tidak kondusif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Dalam suatu perekonomian modern, tingkat harga merupakan indikator atau sinyal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu negara. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan mengaburkan sinyal-sinyal tersebut dan mendistorsi harga-harga yang terjadi. Sinyal-sinyal yang tidak jelas apalagi telah terdistorsi tersebut

akan menyulitkan suatu perencanaan sehingga tidak memotivasi masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan tabungan dan investasi. Oleh karena berbagai dampak negatif tersebut, maka setiap negara akan selalu berusaha untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil.

Bahaya inflasi sangat disadari oleh semua pihak. Hanya bahaya inflasi juga tidak mudah dikendalikan. Selain itu, beban biaya untuk mengendalikan inflasi juga sangat mahal, apalagi laju inflasi sudah terlanjur menjadi tak terkendali, atau yang sering disebut sebagai hiperinflasi. Kesulitan dalam pengendalian laju inflasi tidak terlepas dari banyak faktor yang menyebabkan laju inflasi.

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat mengenai apa itu inflasi, faktor-faktor apa saja yang menimbulkan inflasi, bagaimana menghitung laju inflasi, serta bagaimana pengendalian laju inflasi. Selain itu, juga akan dibahas secara umum mengenai dinamika laju inflasi di Indonesia, terutama yang terkait dengan perkembangan dan berbagai faktor penyebab inflasi, bagaimana menghitung, serta berbagai upaya pengendalian inflasi di Indonesia.

Gambaran Umum

Pengertian Inflasi

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga¹. Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat

1 Untuk hal-hal yang terkait dengan uang dan pengertian uang beredar, pembaca dapat melihat Buku Seri Kebanksentralan No. 1 dan No. 2.

diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Yang pertama adalah "kenaikan harga secara umum" dan yang kedua adalah "terus-menerus". Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai inflasi. Hal ini penting untuk membedakan kenaikan harga atas barang dan jasa tertentu. Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Kata kunci kedua adalah terus menerus, kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, misalnya, menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan "masalah kronis" ekonomi.

Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka indeks dari satu waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka persentase, adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut. Contoh : apabila angka indeks harga konsumen pada Juni 2007 sebesar 99.14 dan angka indeks tersebut pada Juni 2008 menjadi 110.08, maka inflasi tahunan pada bulan Juni 2008 adalah $11.03\%^2$. Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut sebagai laju inflasi (*inflation rate*).

2 Dapat juga dikatakan inflasi selama Juni 2007 sampai dengan Juni 2008 sebesar 11.03%

Inflasi

Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase (%). Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat yang ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Menurut Wikipedia, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah 10%; inflasi sedang antara 10 - 30%; dan inflasi berat antara 30 -100% per tahun; dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Namun demikian, angka-angka inflasi tersebut pada umumnya bersifat relatif dan tidak ada suatu standar yang umum. Di Indonesia, misalnya, apabila angka inflasi masih berupa angka satu digit, misalnya 6 -7%, maka tingkat inflasi tersebut masih dianggap sebagai inflasi yang relatif wajar meskipun tingkat inflasi tersebut relatif lebih tinggi daripada tingkat inflasi negara-negara di kawasan regional. Sedangkan tingkat inflasi untuk negara maju berkisar antara 2 - 3%. Sebaliknya suatu laju inflasi juga dapat terjadi pada suatu angka yang negatif, yang berarti perkembangan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian mengalami penurunan dari waktu ke waktu atau disebut deflasi.

Penghitungan Inflasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum. Dalam pengertian tersebut sangat jelas bahwa inflasi merupakan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa dan bukan hanya harga dari satu jenis barang atau jasa. Berhubung inflasi menyangkut harga sejumlah barang dan jasa, maka penghitungan inflasi tidak sesederhana menghitung kenaikan satu jenis barang atau jasa. Dalam hal suatu perekonomian sudah cukup berkembang dan barang serta jasa yang dikonsumsi masyarakat sudah sangat beranekaragam, maka penghitungan inflasi dapat menjadi sangat kompleks. Mengingat laju inflasi harus mencerminkan perubahan harga dari sejumlah barang dan jasa, maka pada umumnya laju inflasi dihitung dengan menggunakan angka indeks. Kompleksitas penghitungan angka indeks tersebut tidak hanya menyangkut jenis barang dan jasa apa saja yang perlu dimasukkan dalam penghitungan

inflasi, tetapi juga bobot dari masing-masing barang dan jasa yang dihitung dalam inflasi.

Laju inflasi tentu saja dihitung untuk suatu keperluan analisis yang berbeda-beda. Untuk memenuhi keperluan yang berbeda tersebut, maka terdapat beberapa jenis angka inflasi. Dalam praktek dikenal beberapa jenis laju inflasi. Laju inflasi yang paling umum dan dikenal secara luas oleh masyarakat adalah laju inflasi untuk menghitung perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh suatu masyarakat. Laju inflasi tersebut dihitung berdasarkan angka indeks yang disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK).

Untuk menghitung angka laju inflasi jenis ini terlebih dahulu dilakukan penghitungan angka indeks dengan menggunakan sejumlah barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang dipergunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut berbeda dari satu negara dan negara yang lain dan juga dari waktu ke waktu dalam satu negara tertentu, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi konsumen atau masyarakat yang bersangkutan. Contoh : di Indonesia pada awalnya hanya dipergunakan sembilan bahan pokok (yang meliputi pangan, sandang, dan perumahan) yang dikonsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya jumlah barang dan jasa tersebut berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup antara lain jasa kesehatan dan pendidikan.

Masing-masing barang dan jasa yang dipergunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut diberi bobot sesuai dengan signifikansi serta intensitas penggunaan barang dan jasa tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan. Pemberian bobot terhadap masing-masing barang dan jasa tersebut juga tidak sama antara satu negara dan negara yang lain serta dari suatu periode yang satu terhadap periode yang lain. Besarnya bobot untuk masing-masing barang dan jasa tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Inflasi

Selain dihitung berdasarkan IHK, inflasi juga dapat dihitung berdasarkan Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Produsen (IBP), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), atau juga dapat dihitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (PDB deflator). Misalnya, untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa kebutuhan hidup dipergunakan Indeks Biaya Hidup (IBH), untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa perdagangan dikenal Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), untuk mengukur perubahan harga bagi produsen dikenal adanya Indeks Biaya Produsen (IBP), untuk mengukur perubahan harga properti dihitung indeks harga properti, serta angka inflasi yang dihitung dengan deflator Produk Domestik Bruto (Deflator PDB).

Pada dasarnya penghitungan untuk berbagai jenis angka indeks yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya berbagai jenis laju inflasi tersebut sama dengan perhitungan angka IHK. Angka indeks tersebut dihitung secara periodik dan pada umumnya dilakukan secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Selanjutnya, berdasarkan angka indeks tersebut dapat dihitung laju inflasi dalam periode tertentu dengan menghitung perubahan angka indeks dalam periode tertentu. Untuk angka inflasi bulanan, laju inflasi dapat dihitung dari perubahan angka indeks bulanan. Demikian pula untuk menghitung angka inflasi triwulanan, semesteran, maupun inflasi tahunan dari suatu perekonomian tertentu.

Penghitungan berbagai macam inflasi tersebut dilakukan untuk tujuan yang berbeda. Misalnya laju inflasi yang dihitung berdasarkan perubahan pada Indeks Biaya Produsen (IHP) berbeda dengan laju inflasi yang dihitung berdasarkan IHK. Dengan IHP dapat dihitung harga yang diterima oleh produsen. Indeks ini berbeda dengan IHK karena adanya perbedaan harga yang diterima oleh produsen dengan harga yang diterima oleh konsumen. Perbedaan tersebut dapat timbul karena unsur subsidi, pajak, maupun laba. Selain itu, laju inflasi juga dapat dalam pengertian angka deflator Produk Domestik Bruto (deflator PDB), yaitu inflasi yang dipergunakan untuk menghitung perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. Angka deflator tersebut dihitung dengan membandingkan PDB nominal pada suatu tahun tertentu dengan suatu PDB pada tahun tertentu yang ditetapkan

sebagai tahun dasar. Pada tahun dasar tersebut angka indeks ditetapkan sebesar 100%.

Teori tentang Inflasi

Setelah memahami apa yang disebut sebagai inflasi, pada bagian ini akan dibahas tentang teori dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya inflasi. Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori Strukturalis³.

Teori Kuantitas

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori yang dikenal dengan teori kuantitas (tentang uang)⁴. Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Teori kuantitas tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga. Teori kuantitas juga terkait dengan teori tentang (1) proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga, (2) mekanisme transmisi moneter, (3) netralitas uang, dan (4) teori moneter tentang tingkat harga⁵. Ahli ekonomi moneter yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran Monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ini adalah

3 Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Edisi 4, 1982

4 Teori kuantitas uang menggambarkan analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi yang dinyatakan dalam "the equation of exchange": $MV=PT$. Dimana M=jumlah uang beredar, V=tingkat perputaran uang, T=*volume output*, P=tingkat harga. Berdasarkan teori ini, dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output riil, tetapi akan mendorong kenaikan tingkat harga secara proporsional.

5 Pembaca yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang teori kuantitas dapat merujuk pada buku-buku teori moneter, misalnya, Thomas M Humphrey, *Essays on Inflation, Book for Business* (2001).

ekonom Milton Friedman yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1976. Tokoh ini membuat pernyataan yang sangat terkenal, yaitu bahwa “ *inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*”.

Milton Friedman adalah ekonom yang menyempurnakan teori kuantitas dan memformulasikan lebih lanjut teori kuantitas uang serta menyusun teori tentang permintaan uang. Teori permintaan uang tersebut dalam perkembangannya menjadi teori yang sangat penting dalam teori makro ekonomi. Teori permintaan uang dalam perkembangannya juga telah mengalami banyak variasi serta perkembangan yang sangat pesat.

Teori permintaan uang pada dasarnya menyatakan bahwa permintaan uang masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi yang antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga⁶. Sejalan dengan teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi apa yang disebut sebagai deflasi.

Banyak kajian empiris yang membuktikan bahwa pertumbuhan uang beredar dan laju inflasi yang tinggi mempunyai korelasi yang tinggi, misalnya, kajian yang dilakukan oleh Fisher, Sahay dan Vegh (2002, hlm. 847). Mereka menyatakan bahwa dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan laju inflasi menjadi semakin kuat (erat). Apakah dalam

6 Sebagaimana diketahui, definisi atau pengertian uang dalam suatu perekonomian sangat bervariasi dan tidak sama antara satu negara dan negara yang lain. Di Indonesia dikenal Uang Primer atau M0, uang beredar dalam arti sempit (M1), yaitu uang karta ditambah Uang Giral, dan uang beredar dalam arti luas (M2), yaitu M1 ditambah dengan Uang Kuasi. Baca Suseno dan Solikin (2001)

jangka pendek hubungan tersebut juga terjadi?. Dalam hal jangka pendek pertumbuhan uang beredar dan laju inflasi masih mempunyai korelasi yang cukup signifikan, apalagi untuk mengetes hubungan kedua variabel tersebut dengan mempergunakan *data lag*, misalnya, dengan data satu atau dua periode sebelumnya. Meskipun demikian, kajian tersebut juga menyatakan bahwa hubungan dua variabel tersebut tidaklah instan dan juga tidak persis berhubungan langsung satu lawan satu. Kajian ini juga menemukan bahwa laju inflasi yang tinggi cenderung tidak stabil. Sebaliknya, laju inflasi yang rendah cenderung lebih stabil.

Teori Keynes

Dalam perkembangannya, tidak semua ekonom sependapat dengan teori kuantitas uang. Contoh : para ekonom aliran Keynesian tidak sepenuhnya sependapat dengan teori tersebut. Ekonom Keynesian menyatakan bahwa teori kuantitas tidak valid karena teori tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi *full employment* (kapasitas ekonomi penuh). Dalam kondisi kapasitas ekonomi yang belum penuh, maka ekspansi (pertambahan) uang beredar justru akan menambah *output* (meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja) dan tidak akan meningkatkan harga. Lebih lanjut dikatakan bahwa uang tidak sepenuhnya netral, pertambahan uang beredar dapat mempunyai pengaruh tetap (permanen) terhadap variabel-variabel riil seperti *output* dan suku bunga.

Pendekatan Keynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas yang mengasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*velocity of circulation*) adalah tetap juga tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang (*financial assets*). Hal tersebut terbukti bahwa dalam suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi semakin sulit diprediksi.

Dalam perkembangannya perbedaan pendapat antara ekonom aliran monetaris, aliran Keynesian, dan yang lain semakin kecil, atau terjadi konvergensi antara berbagai aliran tersebut. Mishkin (1984, 2001) menyatakan bahwa sepanjang inflasi dilihat sebagai *sustained inflation* atau inflasi yang terus menerus dan berjangka panjang, maka baik ekonom aliran monetaris maupun ekonom aliran Keynesian sependapat bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter⁷. Untuk membuktikan bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter, berbagai kajian yang dipelopori oleh Friedman (1963) dan dilanjutkan oleh berbagai kajian selanjutnya, telah dapat menguji bahwa dalam jangka panjang memang terdapat keterkaitan yang erat antara inflasi dan jumlah uang yang beredar. Dalam pengertian umum dapat dikatakan bahwa inflasi terutama timbul karena jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang beredar yang diminta atau diperlukan oleh perekonomian bersangkutan. Pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan laju inflasi. Banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya inflasi, tetapi inflasi terutama disebabkan oleh jumlah uang beredar atau likuiditas yang berlebihan.

Teori Strukturalis⁸

Teori ini lebih didasarkan pada pengalaman negara-negara di Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi, terutama di negara berkembang, terutama lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian.

Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. *Pertama*, penerimaan

7 Mishkin, Frederic S., "The Cause of Inflation", NBER Working Paper Series No. 1453, National Bureau of Economic Research, September 1984. Mishkin, Frederic, S., "The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Addison-Wesley, World Edition Series, 2001.

8 Baca Boediono, "Seri Sinopsis Ekonomi Makro", Edisi 4, 1982

ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh *terms of trade* yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga. Dengan melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Seringkali negara berkembang melakukan kebijakan substitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan mengakibatkan harga barang yang tinggi sehingga menimbulkan inflasi. *Kedua*, masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya adalah produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal ini mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan pada gilirannya akan menimbulkan inflasi. Sementara itu, proses inflasi, dalam prakteknya, kemungkinan dapat mengandung aspek-aspek dari ketiga teori inflasi tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan Inflasi

Dilihat dari faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan, sisi penawaran, maupun ekspektasi. Faktor yang juga menyebabkan inflasi tersebut dapat merupakan gabungan dari ketiga faktor tersebut.

Inflasi Permintaan

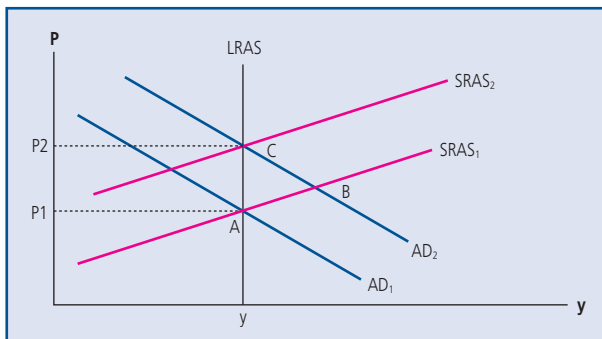
Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua variabel penting yang selalu dijadikan piranti dalam melakukan berbagai analisis ekonomi, termasuk dalam menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Dua variabel tersebut adalah permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat pada

Inflasi

dasarnya merupakan jumlah seluruh kebutuhan konsumsi dan investasi dalam suatu perekonomian. Sedangkan penawaran agregat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perekonomian yang bersangkutan. Penawaran agregat, secara umum, mencerminkan seluruh kapasitas produksi yang dimiliki suatu perekonomian, dan pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang tersedia, teknologi, dan produktivitas. Pada tingkat keseimbangan ekonomi, besarnya permintaan dan penawaran agregat tersebut akan sama.

Dengan menggunakan permintaan dan penawaran agregat selanjutnya akan digambarkan terjadinya kenaikan tingkat harga umum yang terjadi atau yang disebut sebagai inflasi. Dalam grafik 1 perekonomian dalam tingkat keseimbangan jangka panjang yang digambarkan pada titik Y^* , yaitu pada saat kurva permintaan agregat (AD_1) berpotongan dengan kurva penawaran agregat (baik untuk penawaran jangka pendek ($SRAS_1$) maupun penawaran jangka panjang ($LRAS$)), yaitu pada titik A.

Grafik 1
Permintaan dan Penawaran



Dalam jangka panjang penawaran agregat dianggap tetap karena seluruh kapasitas produksi telah dipergunakan. Pada titik tersebut tingkat harga terjadi pada tingkat P_1 . Apabila jumlah uang beredar bertambah, maka sebagai akibatnya jumlah permintaan agregat akan bertambah sehingga

kurva permintaan agregat akan bergeser ke kanan dan menjadi AD2. Pada awalnya, (dalam jangka pendek) perekonomian akan bergeser ke titik B. Akan tetapi, pada titik tersebut perekonomian telah melampaui kapasitas yang tersedia sehingga kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri menjadi SRAS2 sampai pada keseimbangan semula dan berhenti pada titik C. Pada keseimbangan baru tersebut tingkat harga akan meningkat dan tercapai pada titik P2. Apabila penambahan uang beredar terus berlanjut, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pada titik P3, P4 dan seterusnya, dan tidak menambah besarnya *output*. Berdasarkan kondisi tersebut, dikatakan bahwa inflasi terjadi karena penambahan jumlah uang beredar⁹.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah inflasi hanya disebabkan oleh penambahan jumlah uang beredar saja. Jawabannya adalah tidak. Inflasi juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain. Berdasarkan contoh tersebut, penambahan uang beredar dalam jangka pendek telah mengakibatkan penambahan jumlah permintaan agregat. Pertambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek akan mengakibatkan penurunan suku bunga dan selanjutnya akan meningkatkan jumlah investasi dan konsumsi yang secara keseluruhan merupakan jumlah permintaan agregat. Peningkatan permintaan tersebut selanjutnya akan mendorong peningkatan harga-harga. Kejadian tersebut sering disebut sebagai inflasi permintaan atau *demand pull inflation* atau *Philips Curve inflation*.

Inflasi permintaan adalah inflasi yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang¹⁰. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan timbul apabila permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi *output* yang tersedia. Yang dimaksud dengan permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa untuk keperluan

9 Apabila perekonomian dipaksa (didorong) untuk tumbuh melebihi kapasitas yang tersedia, maka perekonomian tersebut akan mengalami apa yang disebut sebagai *overheating*, dan pada kondisi tersebut akan terjadi kenaikan harga pada umumnya.

10 Permintaan domestik (sering diberi simbol Y) adalah penjumlahan dari konsumsi (C), investasi (I) dan ekspor bersih (ekspor (X) dikurangi impor (M)), atau $Y = C + I + (X - M)$. Dalam penghitungan Produksi Domestik Bruto (PDB), permintaan (agregat) domestik akan sama dengan *output* (penawaran agregat).

konsumsi dan investasi dalam suatu perekonomian. Jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi dan diinvestasikan tersebut digambarkan oleh Produksi Domestik Bruto (PDB) perekonomian yang bersangkutan. Sementara itu, yang dimaksud dengan penawaran agregat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu perekonomian untuk dapat memenuhi permintaan agregat.

Perbedaan antara permintaan dan penawaran agregat disebut *output gap*. Apabila permintaan agregat lebih besar dibanding potensi *output* yang tersedia, maka tekanan terhadap inflasi akan semakin besar, dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, *output gap* dapat dipergunakan sebagai indikator apakah terdapat tekanan terhadap laju inflasi. Namun, perlu dicatat bahwa *output gap* tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi ekonomi yang normal. Dalam keadaan tertentu, *output gap* tidak dapat dipergunakan sebagai indikator yang baik. Misalnya, dalam keadaan ekonomi setelah terjadinya krisis, atau suatu perekonomian yang mengalami stagnasi yang disertai inflasi (stagflasi).

Inflasi Penawaran

Faktor kedua yang menyebabkan inflasi adalah faktor penawaran, dan inflasi yang ditimbulkan sering disebut sebagai *cost push* atau *supply shock inflation*. Jenis inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Termasuk dalam jenis inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang (termasuk barang-barang yang harus diimpor), serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh Pemerintah. Contoh : adanya kenaikan harga minyak dunia, harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Di samping itu, inflasi juga disebabkan oleh faktor alam misalnya, gagalnya panen atau panen yang berlebih, faktor-faktor sosial ekonomi, misalnya, adanya masalah atau hambatan dalam distribusi suatu barang, atau faktor-faktor yang timbul karena kebijakan tertentu, misalnya, karena adanya kebijakan tarif, pajak, pembatasan impor, atau kebijakan lainnya.

Inflasi yang disebabkan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran agregat tersebut pada dasarnya mengatakan bahwa apabila jumlah permintaan agregat melebihi penawaran agregat (yang merupakan potensi yang tersedia), maka harga-harga akan meningkat. Secara sederhana dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$P = D/S$$

Apabila P adalah harga, sedangkan D dan S masing-masing adalah permintaan dan penawaran agregat, maka P akan naik selama jumlah D lebih besar dibandingkan dengan jumlah S. Hal tersebut dapat terjadi apabila D meningkat sedangkan S tetap atau kenaikan S tidak sebanding dengan kenaikan D. Hal yang sama juga akan terjadi apabila S berkurang, sedangkan D tetap atau penurunan D tidak sebanding dengan penurunan S.

Inflasi yang disebabkan oleh sisi permintaan maupun penawaran mempunyai kesamaan dalam hal menaikkan tingkat harga *output* (kenaikan harga secara umum-inflasi). Akan tetapi, kedua faktor tersebut mempunyai dampak yang berbeda terhadap volume *output* (PDB riil). Dalam hal inflasi yang lebih disebabkan oleh sisi permintaan, ada kecenderungan *output* akan meningkat sejalan dengan kenaikan harga. Besaran kenaikan *output* tersebut sejalan dengan elastisitas penawaran agregat. Sebaliknya, pada inflasi yang disebabkan oleh sisi penawaran, kenaikan harga seringkali justru diikuti dengan penurunan barang yang tersedia.

Inflasi Ekspektasi

Faktor ketiga yang menyebabkan inflasi adalah ekspektasi. Faktor yang menyebabkan inflasi tidak hanya oleh faktor permintaan dan penawaran. Inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi para pelaku ekonomi atau yang sering disebut inflasi ekspektasi (Gordon, 2007)¹¹. Inflasi ekspektasi sangat berperan dalam pembentukan harga dan juga upah tenaga kerja.

11 Pembaca yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyebab inflasi yang dibahas dalam bagian ini dapat mempelajari artikel yang ditulis oleh Gordon (1997).

Apabila para pelaku ekonomi, baik individu, lembaga atau dunia usaha, berpikir bahwa laju inflasi yang terjadi di waktu-waktu yang lalu masih akan terjadi di waktu yang akan datang, maka para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Demikian juga pelaku usaha akan memperhitungkan biaya produksi dengan kenaikan tingkat harga seperti pada waktu yang lalu. Contoh : apabila pada waktu-waktu yang lalu rata-rata inflasi sebesar 7%, maka seorang pengusaha akan menaikkan harga jual produknya sebesar 7% pada tahun yang akan datang, meskipun laju inflasi yang akan terjadi mungkin tidak sebesar 7%. Seorang tenaga kerja atau seorang yang menyewakan rumahnya mungkin akan berperilaku yang sama. Perilaku yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan oleh para pelaku ekonomi tersebut adalah karena adanya ekspektasi yang terbentuk yang didasarkan pada waktu yang lalu. Ekspektasi yang demikian sering disebut ekspektasi inflasi adaptif, yang terbentuk dari peristiwa ekonomi pada periode-periode yang lalu yang diperkirakan masih bertahan hingga kini.

Pembentukan inflasi ekspektasi yang bersifat adaptif (*backward expectation*) ini dipengaruhi oleh berbagai hal yang antara lain sebagai berikut: i) inflasi permintaan yang persisten di masa lalu, ii) inflasi penawaran yang besar atau sering terjadi, dan iii) inflasi penawaran yang diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Untuk mengurangi dampak ekspektasi inflasi adaptif ini perlu peningkatan kredibilitas (kebijakan) bank sentral. Bank sentral yang kredibel dapat menurunkan ekspektasi inflasi dan mendorong ekspektasi inflasi berdasarkan kondisi ekonomi ke depan (*forward looking*).

Ekspektasi inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi pelaku ekonomi yang didasarkan pada perkiraan yang akan datang akibat adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Misalnya, dengan adanya kebijakan moneter ketat yang dilakukan oleh otoritas moneter pada saat ini, pelaku usaha akan mengambil keputusan usahanya didasarkan ekspektasi mereka terhadap dampak kebijakan moneter ketat tersebut pada masa yang akan datang. Jika masyarakat memperkirakan bahwa dengan adanya kebijakan moneter ketat dan inflasi akan menurun, maka mereka akan

mengambil keputusan usahanya berdasarkan perkiraan tingkat inflasi yang akan datang yang diperkirakan akan menurun. Dalam hal ini pelaku usaha mempunyai ekspektasi inflasi yang didasarkan atas kebijakan yang telah dilakukan otoritas moneter pada saat sekarang. Perilaku pelaku ekonomi yang berdasarkan adanya ekspektasi yang terbentuk dan didasarkan pada perkiraan yang akan datang tersebut disebut ekspektasi yang *forward looking*. Bank sentral mempunyai peran yang besar untuk membentuk ekspektasi tersebut. Kebijakan bank sentral yang kredibel dan konsisten dapat mengarahkan pembentukan ekspektasi inflasi ke depan yang rendah.

Di samping ketiga faktor pembentuk inflasi tersebut, faktor yang menyebabkan inflasi juga dapat dilihat berdasarkan sumber dari inflasi. Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi dapat juga berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Dampak Inflasi

Sebagai akibat kenaikan harga barang dan jasa, maka nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap, misalnya, pegawai negeri, adalah kelompok masyarakat yang menderita akibat inflasi. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap tersebut akan menderita karena secara riil pendapatannya akan menurun atau menjadi lebih kecil. Sementara kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melindungi diri tidak menerima beban yang sama sebagai akibat adanya inflasi.

Ketidakpastian besarnya laju inflasi juga dapat mengakibatkan semakin seriusnya beban atau bahaya inflasi. Laju inflasi yang terlalu berfluktuasi

akan menimbulkan distorsi terhadap tingkat harga. Dalam sistem ekonomi pasar, tingkat harga merupakan sinyal bagi rumah tangga maupun dunia usaha tentang keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu perekonomian. Contoh : apabila kenaikan harga tahu lebih besar dibandingkan harga tempe, maka hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk lebih banyak memproduksi tahu dan mendorong orang akan lebih banyak mengkonsumsi tempe (dengan asumsi hal-hal lain tetap atau dalam istilah ekonominya *ceteris paribus*). Kenaikan harga-harga saham di pasar modal yang secara relatif lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya merupakan tanda-tanda membaiknya prospek dunia usaha, yang lebih lanjut berarti adanya kesempatan untuk melakukan berbagai investasi yang menguntungkan. Harga relatif (bukan harga satu persatu barang dan jasa) merupakan sinyal yang sangat penting bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil berbagai keputusan yang strategis.

Apabila laju inflasi bergejolak (sangat berfluktuasi) dan tidak menentu, maka harga-harga secara relatif juga berubah terhadap tingkat harga secara umum, dan hal tersebut sangat berbahaya karena keadaan tersebut akan mendistorsi sinyal ekonomi yang sangat penting dalam suatu perekonomian, yaitu harga. Perubahan dan variasi harga relatif yang timbul karena adanya ketidakpastian harga (inflasi) dapat mengakibatkan masyarakat (individu dan dunia usaha) memboroskan sumber-sumber daya ekonomi untuk mencari harga yang berbeda-beda.

Salah satu contoh inflasi yang tidak menentu dan tak terkendali adalah apa yang disebut hiperinflasi, yaitu suatu keadaan ketika laju inflasi dapat meningkat ratusan atau bahkan ribuan persen dalam suatu waktu tertentu. Hiperinflasi sangat berbahaya bagi suatu perekonomian. Dalam keadaan hiperinflasi setiap orang akan berusaha untuk membelanjakan uangnya sampai habis atau menukarkannya dengan mata uang yang lebih stabil sebelum harga-harga semakin meningkat. Pada tahun 1960-an Indonesia pernah mengalami hiperinflasi. Demikian juga sejumlah negara lain pernah

mengalami apa yang disebut hiperinflasi tersebut, misalnya, Zimbabwe. Zimbabwe, sebuah negara di kawasan subsahara Afrika, mencatat rekor negara dengan hiperinflasi tertinggi di dunia, yaitu di atas dua juta persen pada 2007. Dengan tingkat inflasi seperti itu, maka harga sebungkus roti bisa naik berkali-kali lipat dalam hitungan jam. Dalam keadaan hiperinflasi tersebut, tingkat harga sebagai sinyal tentang nilai suatu barang atau jasa atau sebagai sinyal dalam alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu negara tidak berfungsi sama sekali. Sementara itu, dampak inflasi juga dapat dibedakan menjadi dampak inflasi yang terduga (*expected inflation*) dan dampak inflasi yang tak terduga (*unexpected inflation*). Baik inflasi yang terduga maupun yang tak terduga akan berpengaruh terhadap distribusi dan alokasi sumber daya dalam suatu perekonomian.

Sebagaimana diketahui, inflasi akan mengakibatkan merosotnya daya beli suatu mata uang. Dengan kata lain, secara riil nilai suatu mata uang menjadi lebih kecil dari nilai nominalnya. Apabila kita memiliki dan menyimpan uang selama satu tahun sebesar Rp 100 dan pada tahun tersebut laju inflasi adalah sebesar 7%, maka daya beli atau nilai riil uang tersebut pada akhir tahun sebenarnya telah berkurang sebesar Rp7. Berkurangnya nilai riil uang tersebut akan berpengaruh terhadap permintaan atau keinginan masyarakat untuk memegang atau menyimpan uang. Dalam hal perekonomian mengalami inflasi yang tinggi, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan berusaha mengurangi jumlah uang yang dipegang dan, sebaliknya akan berusaha untuk menukarkannya pada barang yang nilainya tidak mudah merosot karena inflasi.

Hal tersebut lebih lanjut akan berpengaruh terhadap transaksi ekonomi dan alokasi sumber daya yang ada dalam perekonomian yang bersangkutan. Contoh : dalam transaksi pinjam meminjam uang, inflasi akan berpengaruh terhadap alokasi dana antara debitur dan kreditur. Bagi debitur pembayaran kembali pokok dan bunga atas uang yang dipinjam secara riil menjadi lebih kecil. Dengan demikian, dalam kondisi inflasi yang tinggi kreditur menjadi pihak yang dirugikan dan debitur menjadi pihak yang diuntungkan.

Inflasi

Laju inflasi juga akan mendistorsi pajak pendapatan atau keuntungan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik pajak terhadap perseorangan maupun badan usaha yang pada umumnya bersifat progresif. Artinya, semakin besar pendapatan atau laba yang diperoleh, maka tarif pajaknya akan semakin besar. Sebagaimana diketahui, pajak pada umumnya dikenakan pada pendapatan atau laba nominal yang diperoleh. Dengan adanya inflasi maka kenaikan pendapatan atau keuntungan tersebut juga tidak mencerminkan adanya kenaikan pendapatan atau keuntungan yang mencerminkan daya beli yang sesungguhnya karena sebagian pendapatan atau laba tersebut sudah “termakan” oleh inflasi yang terjadi.

Sebagai ilustrasi, misalnya, seseorang yang melakukan investasi (misalnya menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito) dengan suku bunga 8%. Atas pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak sebesar 20%. Apabila laju inflasi yang terduga sebesar 4%, maka pendapatan bunga riil setelah pajak sebenarnya hanya sebesar 2,4% (dihitung: $(1-20\%)(8\%)-4\%$). Apabila ekspektasi inflasi meningkat menjadi 8% dan suku bunga deposito meningkat menjadi 12%, maka pendapatan bunga riil menjadi hanya 1,6%. Dengan ilustrasi tersebut terlihat dengan jelas bahwa suku bunga harus naik lebih besar daripada kenaikan inflasi agar pendapatan bunga riil dapat dipertahankan. Beban inflasi terduga yang lain adalah apa yang disebut sebagai *menu cost*, atau biaya yang timbul karena adanya perubahan suatu harga. Untuk toko-toko yang besar, misalnya, berupa ongkos untuk mengganti label-label harga yang sudah ditempel termasuk juga biaya untuk menginformasikan adanya perubahan harga, dsb.

Para pelaku ekonomi pada umumnya adalah pihak-pihak yang sangat rasional dan selalu memperhitungkan untung rugi dalam setiap tindakan maka, berkaitan dengan hal tersebut dalam setiap transaksi, para pelaku ekonomi pada umumnya memperhitungkan laju inflasi yang akan terjadi. Penghitungan tersebut terutama dilakukan pada transaksi yang memerlukan jangka waktu, misalnya, melakukan transaksi pinjam-meminjam, mengerjakan suatu proyek yang penyelesaiannya memerlukan jangka waktu, dan perjanjian jual-beli berjangka. Dalam melakukan transaksi yang demikian,

pada umumnya nilai transaksi sudah ditambah dengan besarnya inflasi dalam jangka waktu transaksi sejak mulai sampai selesainya transaksi tersebut. Tentu saja inflasi yang diperkirakan tersebut tidak selalu sama dengan tingkat inflasi yang sesungguhnya terjadi. Sebagai akibat perbedaan antara laju inflasi yang sudah diperkirakan dan laju inflasi yang sesungguhnya terjadi, maka akan ada pengaruh terhadap distribusi atau alokasi sumber-sumber daya ekonomi dalam suatu perekonomian.

Sebagai ilustrasi, misalnya, dengan asumsi tidak ada ekspektasi inflasi (inflasi 0%), sebuah bank yang meminjamkan uang kepada seorang debitur sebesar Rp1000 dengan suku bunga sebesar 4%. Pada akhir tahun berapa pun besarnya laju inflasi, bank tersebut akan menerima kembali uang yang dipinjamkan sebesar $Rp1000 \times 1.04 = Rp1040$. Seandainya ternyata laju inflasi yang terjadi adalah sebesar 7%, maka uang yang diterima bank tersebut secara riil sebenarnya berkurang (daya belinya minus sebesar) 3%, karena sebenarnya suku bunga riil yang terjadi adalah sebesar 3%. Hal tersebut terjadi karena adanya inflasi yang tak terduga sebesar 7%-0% atau sebesar 7%. Berdasarkan kejadian tersebut sebenarnya telah terjadi transfer daya beli uang sebesar Rp70 dari kreditur kepada debitur. Contoh lain : adanya redistribusi pendapatan dalam hal terjadi inflasi yang tak terduga adalah berkurangnya upah riil bagi pegawai yang menerima gaji tetap secara nominal.

Pengendalian Inflasi

Inflasi adalah gejala umum yang terjadi di berbagai belahan dunia dan terjadi baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Inflasi juga bukan masalah baru. Inflasi bahkan sudah dikenal sejak jaman Romawi. Banyak negara yang dapat dengan baik mengendalikan laju inflasi dengan baik. Akan tetapi juga tidak sedikit negara yang meskipun sudah berusaha keras, tetap mengalami laju inflasi yang tinggi, bahkan mengalami hiperinflasi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, inflasi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian. Mengingat dampak negatif yang

ditimbulkan, maka setiap negara berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi pada suatu tingkat yang rendah dan stabil. Yang menjadi pertanyaan adalah pada tingkat berapakah suatu inflasi dianggap sebagai inflasi yang rendah, sedang, atau tinggi. Sayangnya, tidak terdapat konsensus di antara para ekonom dan pengambil kebijakan ekonomi mengenai berapa inflasi yang dapat dianggap rendah. Tinggi atau rendahnya laju inflasi bersifat sangat relatif dan berbeda-beda dari satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam suatu perekonomian sering terjadi perbedaan persepsi tentang inflasi yang dapat ditoleransi. Di negara-negara maju, tingkat inflasi yang rendah dan dianggap wajar pada umumnya berkisar antara 2 sampai 3%. Di Indonesia angka inflasi *single digit*, yang artinya kurang dari 10% masih dianggap wajar. Di Indonesia sampai dengan tahun 1990-an sering dikatakan bahwa inflasi *single digit* dianggap sebagai "batas psikologis", artinya, inflasi apabila melampaui *single digit* baru dianggap berbahaya. Dengan kata lain, inflasi sampai 9% masih dianggap wajar. Dornbusch dan Fischer (1993)¹², misalnya, mengklasifikasikan laju inflasi menjadi laju inflasi yang moderat (sedang), tinggi, sangat tinggi (ekstrem) dan hiperinflasi.

Terlepas dari berapa angka inflasi yang dianggap cukup rendah, semua negara di dunia sepakat bahwa inflasi adalah tidak baik dan harus dapat dikendalikan. Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang tepat. Kebijakan ekonomi pokok yang dipergunakan untuk mengendalikan inflasi pada umumnya adalah kebijakan fiskal dan moneter.

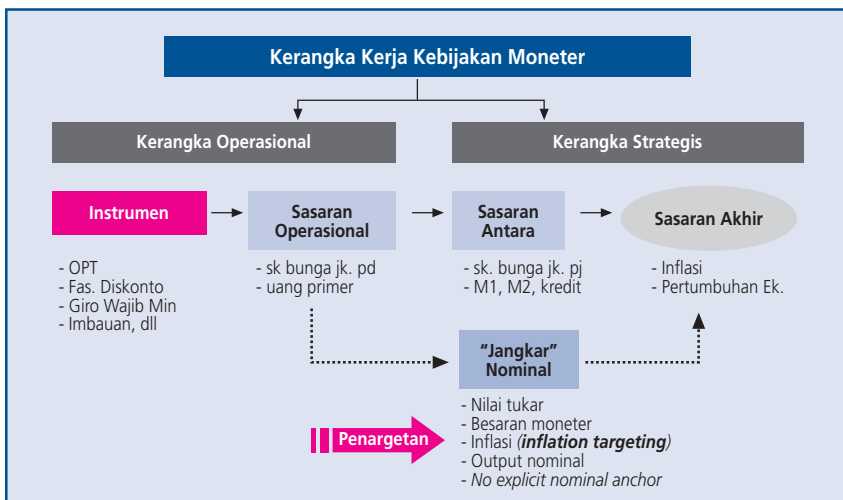
Untuk dapat mengendalikan laju inflasi, tentunya perlu diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab inflasi yang telah didiskusikan pada bagian sebelumnya, maka untuk mengendalikan inflasi perlu kebijakan yang sesuai dengan faktor penyebabnya. Untuk mengatasi inflasi permintaan, karena faktor penyebabnya adalah kelebihan uang beredar, maka kebijakan yang sesuai

12 Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer, "Moderate Inflation" World Bank Economic Review", No.7, 1993, pp 1-44.

adalah kebijakan moneter. Sementara, itu untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran, maka kebijakan yang sesuai adalah kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi lainnya. Namun, untuk mengendalikan laju inflasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, maka diperlukan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan lainnya dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal kebijakan moneter, kerangka kerja suatu kebijakan moneter pada tiap negara tidak sama. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh kondisi ekonomi dan berbagai hal lain seperti aspek hukum dan kelembagaan yang tidak sama pada masing-masing negara. Berhubung adanya berbagai perbedaan tersebut, maka sasaran akhir kebijakan moneter, maupun cara untuk mencapai, dan piranti yang dipergunakan untuk mencapai target akhir kebijakan moneter juga dapat berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Kerangka kerja kebijakan moneter secara umum dapat digambarkan pada diagram 1. Kerangka kerja tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kerangka kerja operasional dan kerangka kerja strategis.

Diagram 1
Kerangka Kerja Kebijakan Moneter



Gambar tersebut menunjukkan bahwa inflasi (dan dalam beberapa hal) kebijakan moneter juga dapat diarahkan untuk mencapai sasaran lain, misalnya, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut diperlukan suatu piranti moneter (*monetary instrument*). Untuk mengendalikan inflasi dapat digunakan kebijakan moneter yang bersifat langsung atau tidak langsung. Pengendalian inflasi secara tidak langsung seringkali dilakukan melalui operasi pasar terbuka (OPT). Untuk melakukan OPT, maka bank sentral perlu instrumen moneter yang antara lain dapat berupa surat utang pemerintah dan atau surat utang bank sentral. Selain melalui OPT, pengendalian inflasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen giro wajib minimum (*reserve requirement*), dan imbauan (*moral suasion*).

Dalam kerangka sebagaimana digambarkan tersebut, sasaran akhir kebijakan moneter tidak dapat langsung dicapai, dan harus melalui sasaran antara dan sasaran operasional. Sasaran antara (*intermediate target*) dapat berupa jumlah uang beredar, apakah uang beredar dalam arti sempit (M1) atau uang beredar dalam arti luas (M2). Sasaran antara berupa jumlah uang beredar biasa digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter yang berbasis agregat moneter (*quantity-based approach*)¹³. Di samping itu, sasaran antara juga dapat berupa suku bunga jangka panjang. Sasaran antara suku bunga jangka panjang biasa digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter yang berbasis suku bunga. Sementara itu, untuk mencapai sasaran antara tersebut, perlu adanya sasaran operasional. Sasaran operasional dapat berupa uang primer (M0) atau suku bunga jangka pendek.

Kerangka kebijakan moneter dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Semakin banyak negara yang

13 Asumsi yang digunakan dalam pendekatan kuantitas adalah: i) kebijakan dan perkembangan sektor-sektor lain (fiskal, nilai tukar, dan riil) akan berjalan seperti yang ditetapkan; ii) adanya hubungan yang stabil antara uang beredar (sebagai sasaran antara) dengan kegiatan ekonomi riil (sebagai sasaran akhir), sehingga perlu adanya stabilitas *income velocity* dan *demand for money*; adanya hubungan yang stabil antara uang primer (sebagai sasaran operasional) dan uang beredar (sebagai sasaran antara) sehingga ada stabilitas *money multiplier*.

beralih menggunakan kebijakan moneter yang berbasis suku bunga dan semakin banyak negara yang menganut *inflation targeting framework* (ITF). Bagi negara yang menganut kebijakan moneter dengan sasaran akhir yang memprioritaskan pencapaian stabilitas harga (ITF)¹⁴, sasaran antara sudah menjadi tidak begitu penting lagi, sementara itu, sasaran operasionalnya pada umumnya menggunakan suku bunga jangka pendek. Sejak Juli 2005, Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia juga mulai menerapkan ITF tersebut¹⁵.

Inflasi di Indonesia

Penghitungan Laju Inflasi di Indonesia

Pengertian inflasi sebagaimana dipahami oleh masyarakat secara luas adalah inflasi yang dihitung berdasarkan suatu indeks yang disebut sebagai Indeks Harga Konsumen atau yang lebih sering disebut sebagai inflasi IHK. Angka IHK dihitung berdasarkan survei terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga IHK adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut.

14 Prinsip ITF antara lain: i) memiliki prioritas sasaran utama (*overriding objective*) yaitu sasaran inflasi; ii) bersifat antisipatif karena adanya efek tunda dari dampak kebijakan moneter; iii) mengikat diri pada suatu aturan, tetapi cukup fleksibel dalam operasionalisasinya; iv) menganut prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (*good governance*), transparan, dan berakuntabilitas.

15 Hasil kajian empiris Bank Indonesia (BI) menyimpulkan bahwa *income velocity*, *demand for money*, dan *money multiplier* di Indonesia cenderung kurang stabil. Penyebab ketidakstabilan tersebut antara lain pesatnya perkembangan sektor keuangan dan majunya inovasi produk keuangan sehingga penciptaan uang oleh sistem keuangan menjadi meningkat tajam. Di samping itu, M0 tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh BI karena sekitar 70% komponen M0 adalah uang kartal yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi. Sehingga kerangka kebijakan moneter yang berbasis *monetary aggregate* dirasakan kurang efektif dan beralih ke pendekatan suku bunga dan memprioritaskan pencapaian sasaran inflasi, ralih ke pendekatan suku bunga, tujuan utama kebijakan moneter juga

Inflasi

Cakupan jumlah barang dan jasa yang diperhitungkan dalam angka indeks tersebut sangat tergantung pada perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sementara itu, inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum selama periode pengamatan (bulan, kuartal, dan tahun). Tingkat inflasi dihitung dengan IHK, yaitu dengan membandingkan IHK pada tahun dasar dengan IHK periode pengamatan. IHK di Indonesia dihitung menggunakan formula Laspeyres yang dimodifikasi sebagai berikut:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{0,i}}{\sum_{i=1}^k P_{0,i} \cdot Q_{0,i}} \times 100$$

Dimana :

I_n = Indeks periode ke-n

P_{ni} = Harga barang ke-i pada periode ke-n

$P_{(n-1)i}$ = Harga jenis barang ke-i periode ke-(n-1)

$P_{n,i} Q_i$ = Nilai konsumsi jenis barang ke-i pada periode ke-n

$P_{(n-1),i} Q_i$ = Nilai konsumsi jenis barang ke-i pada periode ke-(n-1)

K = Jumlah jenis barang paket komoditi

IHK Indonesia tersebut disusun berdasarkan indeks bulanan sehingga inflasi bulanan didefinisikan sebagai perbandingan IHK pada bulan periode tertentu dengan IHK bulan sebelumnya.

Barang dan jasa yang dimasukkan dalam IHK untuk menghitung inflasi telah mengalami perkembangan dan perbaikan dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 1950-an, IHK hanya memperhitungkan harga sejumlah bahan makanan. Daerah yang dipergunakan sebagai wilayah survei juga masih sangat terbatas, yaitu hanya dihitung dari beberapa kota besar di Indonesia,

yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, dan Pontianak. Dalam perkembangannya angka indeks harga konsumen tersebut terus mengalami penyempurnaan. Jumlah barang dan jasa yang diperhitungkan dalam angka indeks terus mengalami penambahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi konsumen di Indonesia. Demikian juga dengan cakupan daerah yang diperhitungkan dalam wilayah survei.

Pada saat ini, tahun 2008, IHK dihitung berdasarkan 774 jenis barang dan jasa yang diperoleh berdasarkan survei di 66 kota besar di Indonesia. Perkembangan jumlah barang dan jasa serta cakupan daerah survei untuk penghitungan angka indeks dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Keranjang IHK

Periode	Tahun Dasar (IHK=100)	Area Survei	Jumlah barang yang disurvei
1963	1953	Jakarta	19 Komoditi
1964 - 1978	1957/1958	Jakarta	62 Komoditi; 4 Kelompok
1978 - 1989	Apr 1977-Mar 1988	17 Kota	115 Komoditi; 4 Kelompok
Jan 1990 - Mar 1998	Apr 1988-Mar 1989	27 Kota	225 Komoditi; 4 Kelompok
Apr 1998 - Sep 1999	1996	44 Kota	353 Komoditi; 7 Kelompok
Okt 1999 - Des 2003	1996	43 Kota	353 Komoditi; 7 Kelompok
Jan 2004 - Jun 2008	2002	45 Kota	744 Komoditi; 7 Kelompok
Jul 2008 - sekarang	2007	66 Kota	774 Komoditi; 7 Kelompok

Kelompok barang dan jasa yang diperhitungkan dalam indeks harga konsumen sejak April 1998 dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: i) bahan makanan, ii) makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, iii) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, iv) sandang, v) kesehatan, vi) pendidikan, rekreasi, dan olah raga, dan vii) transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Setiap kelompok dikelompokkan kembali menjadi beberapa sub kelompok dan setiap subkelompok terdiri dari beberapa jenis.

Untuk memperhitungkan besarnya konsumsi masyarakat atas setiap jenis barang dan jasa yang termasuk dalam angka indeks tersebut, dari waktu ke

Tabel 2
Struktur IHK

Bobot Kelompok/Sub Kelompok		Tahun Dasar 2007 (2007=100)
Umum		100,00
I.	BAHAN MAKANAN	19,57
	Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	4,75
	Daging dan Hasil-hasilnya	2,52
	Ikan Segar	2,50
	Ikan Diawetkan	0,59
	Telur, Susu dan Hasil-hasilnya	2,06
	Sayur-sayuran	1,64
	Kacang-kacangan	0,81
	Buah-buahan	1,64
	Bumbu-bumbuan	0,81
	Lemak dan Minyak	1,45
	Bahan Makanan Lainnya	0,19
II.	MAKANAN JADI, MUNIMAN, ROKOK & TEMBAKAU	16,55
	Makanan Jadi	10,31
	Minuman yang tidak Beralkohol	2,85
	Tembakau dan Minuman Beralkohol	3,39
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR	25,41
	Biaya Tempat Tinggal	13,84
	Bahan Bakar, Penerangan dan Air	5,91
	Perlengkapan Rumah Tangga	2,32
	Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,34
IV.	SANDANG	7,09
	Sandang laki-laki	1,74
	Sandang Wanita	1,77
	Sandang Anak-anak	1,19
	Barang Pribadi dan Sandang Lain	2,40
V.	KESEHATAN	4,44
	Jasa Kesehatan	1,65
	Obat-obatan	0,78
	Jasa Perawatan Jasmani	0,31
	Perawatan Jasmani dan Kosmetika	1,69
VI.	PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAH RAGA	7,81
	Jasa Pendidikan	3,57
	Kursus-kursus/Pelatihan	0,34
	Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	1,11
	Rekreasi	2,58
	Olah raga	0,21
VII.	TRANSPORTASI, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	19,12
	Transportasi	12,25
	Komunikasi dan Pengiriman	4,76
	Sarana dan Penunjang Transpor	1,61
	Jasa Keuangan	0,50

Sumber : BPS dan Bank Indonesia

waktu pemerintah melakukan survei biaya hidup. Survei biaya hidup yang terakhir dilakukan pada tahun 2007 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di 66 kota. Jumlah, tipe, spesifikasi, dan kualitas barang dan jasa yang dipilih untuk dimasukkan dalam penghitungan IHK adalah barang yang paling banyak dikonsumsi dan dibeli pada periode survei biaya hidup dilakukan. Survei ini juga menentukan signifikansi barang dan jasa secara relatif terhadap keranjang IHK keseluruhan. Masing-masing kelompok barang tersebut mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan signifikansinya. Tabel 2 mempresentasikan bobot untuk masing-masing kelompok barang dalam IHK.

Selain pembobotan terhadap barang dan jasa, pembobotan juga dilakukan terhadap kota yang disurvei, yaitu 66 kota besar di Indonesia. Tabel 3 menunjukkan pembobotan IHK berdasarkan kota. Tabel 3 mengindikasikan bahwa bobot penimbang kota terbesar sebagian besar adalah DKI Jakarta dan sekitarnya, yaitu (tidak urut berdasarkan bobot terbesar): Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Palembang dan Batam.

BPS menentukan besarnya bobot penimbang kota berdasarkan proporsi jumlah rumah tangga ekonomi tipikal (artinya rumah tangga tersebut menerima pendapatan juga sekaligus mengeluarkan untuk kegiatan konsumsinya) yang ada di daerah tersebut terhadap nasional. Jumlah rumah tangga ekonomi daerah tersebut diperoleh melalui Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2007.

Untuk keperluan analisis, Bank Indonesia juga melakukan pengelompokan jenis barang dan jasa yang dihitung dalam IHK. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membedakan jenis-jenis barang dalam keranjang IHK yang harganya diatur/dikendalikan dan barang dan jasa yang harganya tidak dikendalikan oleh pemerintah. Di samping itu, terdapat juga pengelompokan barang yang harganya berfluktuasi. Dengan kata lain, kelompok barang dan jasa dalam keranjang IHK tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: i) komoditi dalam kelompok inti, ii)

Tabel 3
Bobot Penimbang Kota

No	Nama Kota	Bobot Kota (SBH 2007)	No	Nama Kota	Bobot Kota (SBH 2007)
1	Lhokseumawe	0,28	34	Palangkaraya	0,36
2	Banda Aceh	0,31	35	Banjarmasin	1,54
3	Padang Sidempuan	0,26	36	Balikpapan	1,11
4	Sibolga	0,21	37	Samarinda	1,31
5	Pematang Siantar	0,56	38	Manado	0,98
6	Medan	4,67	39	Palu	0,59
7	Padang	1,69	40	Makassar	2,56
8	Pekanbaru	1,7	41	Kendari	0,43
9	Batam	2,02	42	Gorontalo	0,37
10	Jambi	0,98	43	Ambon	0,42
11	Palembang	2,96	44	Ternate	0,28
12	Bengkulu	0,59	45	Jayapura	0,40
13	Bandar Lampung	1,91	46	Bekasi	5,26
14	Pangkal Pinang	0,34	47	Tangerang	3,94
15	Jakarta	22,49	48	Depok	3,76
16	Tasikmalaya	0,52	49	Bogor	2,20
17	Bandung	5,35	50	Cilegon	0,69
18	Cirebon	0,78	51	Sukabumi	0,73
19	Purwokerto	0,47	52	Probolinggo	0,46
20	Surakarta	1,27	53	Tanjung Pnang	0,45
21	Semarang	3,48	54	Madiun	0,43
22	Tegal	0,62	55	Tarakan	0,36
23	Yogyakarta	1,03	56	Dumai	0,37
24	Jember	0,71	57	Sorong	0,34
25	Kediri	0,69	58	Singkawang	0,23
26	Malang	1,77	59	Manokwari	0,09
27	Surabaya	6,47	60	Pare-pare	0,22
28	Serang	0,74	61	Bima	0,21
29	Denpasar	1,53	62	Palopo	0,19
30	Mataram	0,79	63	Bone/Wtampoe	0,18
31	Kupang	0,49	64	Sumenep	0,34
32	Pontianak	1,05	65	Sikka/Maumere	0,09
33	Sampit	0,29	66	Mamuju	0,06
				TOTAL	100,00

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

komoditi dalam kelompok *administered prices*, dan iii) komoditi dalam kelompok *volatile prices*. Dengan menggunakan data berdasarkan survei biaya hidup tahun 2002, komoditi yang dipenghitungkan dalam keranjang IHK terdiri dari 744. Perincian dari 744 komoditi tersebut adalah: i) 670

komoditi termasuk dalam komoditi untuk penghitungan inflasi inti (*core inflation*); ii) 19 komoditi yang termasuk dalam *administered prices*, dan iii) 74 komoditi yang termasuk dalam *volatile prices*.

Dari ketiga kelompok komoditi dalam keranjang IHK tersebut, tidak semuanya dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Oleh karena itu, untuk keperluan analisis, sebagaimana juga dilakukan oleh banyak otoritas moneter di banyak negara, penting dilakukan penghitungan inflasi yang dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter atau yang sering disebut sebagai inflasi inti (*core inflation*).

Penghitungan inflasi inti tidak selalu sama untuk setiap negara. Inflasi inti di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu tingkat inflasi IHK setelah dikeluarkan bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi (*volatile food prices*) dan barang-barang yang harganya banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah (*administered prices*). Komoditi yang termasuk dalam *volatile prices antara lain* beras, cabe, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Sedangkan komoditi yang termasuk dalam *administered prices antara lain* bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik.

Perkembangan Inflasi di Indonesia

Laju inflasi di Indonesia telah mengalami dinamika dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi sejak awal kemerdekaan Indonesia. Laju inflasi yang tercatat secara teratur dalam berbagai terbitan sejak proklamasi kemerdekaan adalah sejak tahun 1953. Perhitungan dan pencatatan laju inflasi tersebut dilakukan oleh Biro Pusat Statistik atau yang sekarang dikenal sebagai Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS.

Inflasi sebagaimana dikenal masyarakat pada saat ini adalah angka inflasi yang dihitung berdasarkan suatu angka indeks, yang dikenal sebagai indeks harga konsumen (IHK). Angka indeks ini disusun berdasarkan survei biaya hidup yang dilakukan oleh BPS. Survei tersebut pada awalnya hanya menyangkut harga bahan makanan dan dilakukan pada wilayah yang

terbatas. Angka indeks harga makanan tersebut pada awalnya hanya meliputi 12 jenis bahan makanan untuk daerah pedalaman di Jawa dan 19 jenis bahan makanan di kota-kota besar, yaitu Jakarta, Makasar, Medan dan Pontianak. Pada tahun 1964 jumlah barang yang disurvei ditambah dan menjadi harga 62 jenis barang¹⁶.

Dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya perekonomian dan kegiatan masyarakat, angka indeks tersebut terus mengalami perbaikan, baik dalam hal jenis barang yang dipergunakan maupun cakupan wilayah yang disurvei untuk menghitung perubahan biaya hidup tersebut. Perkembangan jumlah atau jenis barang dan cakupan wilayah yang disurvei adalah sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat mencerminkan tingkat dan variasi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Perkembangan jumlah atau jenis barang serta cakupan wilayah atau daerah untuk perhitungan IHK dari tahun 1953 sampai dengan 2007 telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada kurun waktu yang bersangkutan¹⁷.

Diskusi perkembangan laju inflasi di Indonesia akan dibagi dalam beberapa periode, yaitu: i) periode 1953-1965, ii) periode 1966-1970, iii) periode 1970 an sampai dengan 1996 (sebelum krisis finansial Asia 1997/98), dan iv) periode 1998 sampai dengan sekarang (periode setelah krisis finansial Asia 1997/98). Pembagian periode tersebut untuk mempermudah pembahasan sesuai dengan perkembangan ekonomi yang menonjol pada kurun periode tersebut.

Inflasi 1953 - 1965

Perkembangan laju inflasi di Indonesia pada 1953 s.d. 1965 dipresentasikan pada Tabel 4 Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan

16 62 jenis barang yang dipergunakan sejak tahun 1964 dikelompokkan: 22 jenis bahan makanan, 6 jenis perumahan, 12 jenis pakaian, dan 15 jenis barang lain-lain.

17 Perkembangan jumlah jenis barang yang disurvei dapat dilihat pada Tabel 1 Keranjang IHK.

indeks harga konsumen. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, laju inflasi telah mengalami laju pertumbuhan yang sangat pesat, terutama mulai dari tahun 1960 sampai tahun 1965.

Tabel 4
Indeks Harga Bahan Makanan 1953-1965,
1953=100

Tahun	Pedalaman Jawa	Jakarta	Makasar	Medan	Pontianak
1953	100	100	87	100	115
1954	97	106	94	110	120
1955	127	141	135	167	171
1956	153	161	161	168	186
1957	160	177	169	165	180
1958	244	258	232	259	304
1959	271	311	272	338	425
1960	348	384	344	430	549
1961	565	523	424	530	644
1962	1.721	1.453	982	1.678	1.758
1963	3.541	3.264	2.194	3.634	3.812
1964	7.379	7.037	2.690	2.281	3.449
1965	25.306	30.782	8.994	12.403	9.461

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia berbagai tahun

Selama periode tahun 1960 sampai dengan 1965 angka indeks harga bahan makanan, baik dari 12 bahan makanan di daerah pedalaman Jawa, maupun dari 19 bahan makanan di beberapa kota besar menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi. Kenaikan yang mencolok terjadi pada tahun 1961 dan tahun-tahun berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga pada periode tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengaruh perjuangan pembebasan Irian Barat dan konfrontasi terhadap Malaysia.
- 2) Adanya spekulasi secara berlebihan dalam perdagangan sehingga terjadi tekanan pada harga.
- 3) Menipisnya persediaan bahan makanan pokok, terutama beras, jagung dan ketela pohon akibat tidak seimbangnya kenaikan produksi dengan permintaan.

Inflasi

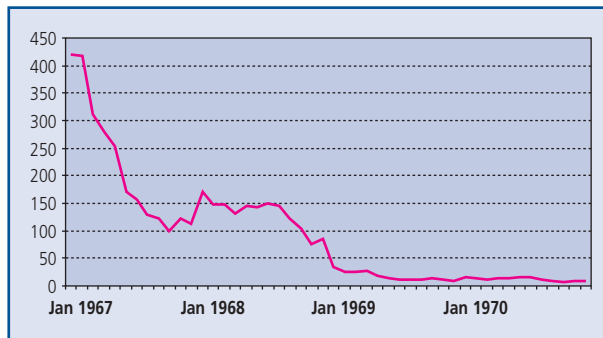
- 4) Tidak mencukupinya alat-alat pengangkutan/transportasi baik perhubungan darat dan antarpulau sehingga mengganggu distribusi.
- 5) Naiknya biaya pengangkutan akibat kurangnya persediaan dan mahalnnya harga *spareparts*.

Di samping itu, kenaikan tingkat harga yang sangat tinggi juga terkait dengan bergejolaknya situasi politik pada waktu tersebut.

Inflasi 1966 - 1970

Dengan membaiknya situasi politik, pada 1967 pemerintah mulai melakukan kebijaksanaan yang lebih diarahkan pada usaha-usaha untuk menyetatkan perekonomian nasional, khususnya kebijaksanaan untuk menekan laju inflasi. Inflasi mulai memperlihatkan perkembangan yang lebih baik dan pada akhir tahun 1970 inflasi telah berhasil ditekan menjadi di bawah 10% (Grafik 2).

Grafik 2
Inflasi Indonesia 1967-1970



Kebijakan pemerintah untuk menurunkan laju inflasi dari di atas 400% pada 1967 menjadi 8.9% pada 1970 tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Melakukan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang (*balance budget*).

- 2) Melakukan penyesuaian harga beberapa barang dan jasa yang sebelumnya, telah dinaikkan sangat tinggi.
- 3) Melaksanakan sistem baru dalam pengadaan pangan oleh BULOG.

Selain kebijakan di atas, membaiknya tingkat inflasi juga disebabkan oleh meningkatnya produksi pangan (terutama beras) dan membaiknya situasi keamanan dalam negeri.

Inflasi 1971 - 1997

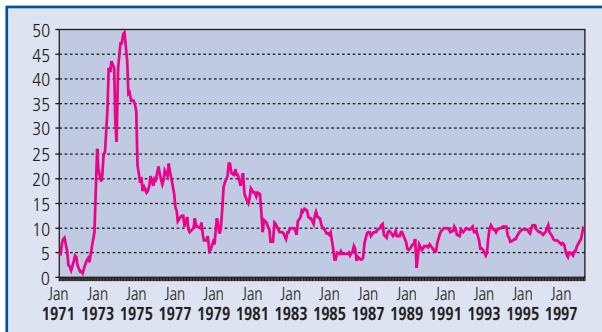
Kebijakan stabilisasi ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 1968 berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat harga sehingga tingkat harga terus menunjukkan tendensi penurunan yang sangat signifikan. Namun demikian, perkembangan tersebut mengalami gangguan pada akhir tahun 1972 yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang tinggi sehingga mencapai 25,7% selama tahun 1972. Kenaikan inflasi yang tinggi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan indeks bahan makanan, khususnya indeks harga beras (harga beras naik 88%) karena panen yang kurang baik sebagai akibat musim kemarau yang panjang.

Kenaikan laju inflasi terus berlanjut pada tahun 1973-74. Kenaikan inflasi yang tinggi pada tahun ini terkait dengan faktor eksternal karena meningkatnya harga minyak di pasar dunia. Dengan meningkatnya harga minyak, maka penerimaan pemerintah meningkat yang berakibat meningkatkan jumlah uang beredar dan pada gilirannya mendorong kenaikan tingkat harga. Untuk mengurangi tekanan inflasi, pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi pada April 1974. Kebijakan stabilisasi dalam kebijakan moneter ditujukan untuk menyerap ekspansi moneter akibat meningkatnya penerimaan pemerintah dari kenaikan harga minyak agar tidak menimbulkan kelebihan likuiditas dalam perekonomian. Pada tahun 1974, pemerintah menempuh kebijakan kredit selektif agar jumlah uang beredar dapat dikendalikan dan laju inflasi dapat ditekan. Dengan adanya paket kebijakan stabilisasi, dalam hal kebijakan moneter berupa kebijakan kredit selektif, maka pada periode *oil boom* inflasi terus dapat dikendalikan.

Selanjutnya, dengan menurunnya harga minyak di pasar dunia pada awal 1980an, maka pada 1983 dilakukan kebijakan deregulasi di sektor moneter dan perbankan. Kebijakan deregulasi pada 1983 tersebut, secara umum, mengubah sistem pengendalian moneter dari yang bersifat langsung melalui kredit selektif dan penentuan suku bunga terhadap bank pemerintah menjadi pengendalian secara tidak langsung yang lebih berorientasi pasar, dan bank dibebaskan untuk menentukan suku bunganya.

Sebelum kebijakan deregulasi Juni 1983, pemerintah melakukan kebijakan devaluasi pada Maret 1983. Kebijakan devaluasi ini berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi pada tahun 1983. Di samping itu, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri pada tanggal 12 Januari 1984 juga berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi. Selama tahun 1983/1984 kenaikan harga rata-rata per bulan adalah 1.05%, dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari 1984, yaitu masing-masing sebesar 3,42% dan 1,66% yang erat kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Di samping itu, kenaikan harga yang cukup tinggi juga terjadi pada bulan April dan Juni 1983, yaitu masing-masing sebesar 2,43% dan 1,58%. Kenaikan tersebut terkait erat dengan kebijakan devaluasi rupiah sebesar 27,6% pada Maret 1983. Secara singkat tersimpul bahwa selama periode 1970-an sampai dengan 1996/97 (sebelum krisis finansial Asia), laju inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun sehingga pada 1996 inflasi hanya 6.63% (Grafik 3).

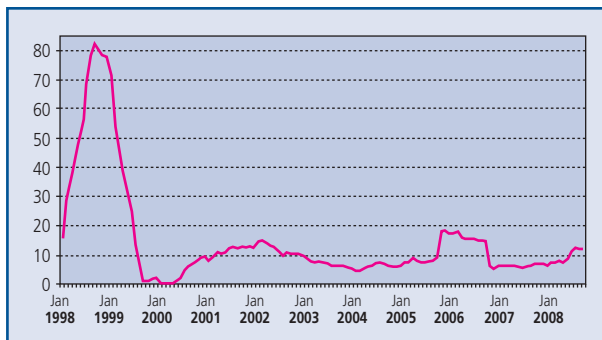
Grafik 3
Laju Inflasi yoy di Indonesia, 1971-1997 (%)



Inflasi 1998 - 2008

Dengan terjadinya krisis finansial Asia yang berdampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, maka laju inflasi meningkat tajam dalam tahun 1998 sehingga mencapai 77.6% setahun (Grafik 4). Tingginya laju inflasi terutama berkaitan dengan meningkatnya harga barang yang memiliki kandungan impor tinggi sebagai akibat krisis nilai tukar.

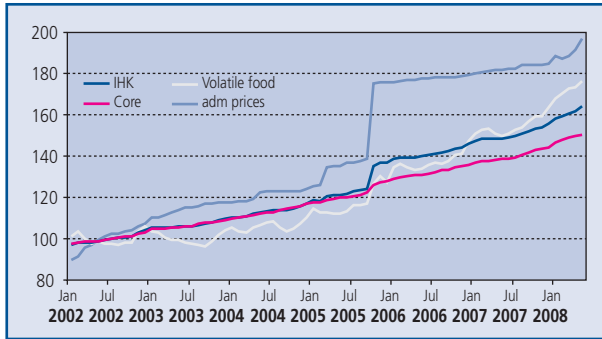
Grafik 4
Laju Inflasi yoy di Indonesia, 1998-2008 (%)



Karena tingkat harga yang sudah sangat tinggi pada tahun 1998, maka laju inflasi pada 1999 menurun tajam menjadi 2.01%. Penurunan laju inflasi ini selain karena tingkat harga yang sudah tinggi juga ada perbaikan dari sisi penawaran jangka pendek, yaitu kecukupan pasokan bahan makanan oleh pemerintah, perbaikan produksi sektoral, dan kelancaran distribusi barang-barang akibat membaiknya kondisi keamanan.

Sementara itu, laju inflasi selama tahun 2000 sampai dengan 2008 mengalami fluktuasi yang pada dasarnya dapat ditekan pada tingkat yang relatif rendah, tetapi inflasi juga mengalami kenaikan yang tinggi pada waktu tertentu karena adanya kenaikan *administered prices* (Grafik 5).

Grafik 5
IHK, Core, Administered prices, dan Volatile food



Selama periode 2000-September 2008, *administered prices* seringkali lebih tinggi daripada IHK. Hal ini mengindikasikan bahwa *administered prices* mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap kenaikan inflasi IHK. Misalnya pada tahun 2001, inflasi pada tahun 2001 (12.55%) lebih tinggi daripada tahun 2000 (9.35%) yang terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga dan tarif sejumlah barang dan jasa, seperti BBM, listrik, air minum, dan rokok, serta menaikkan upah minimum.

Kenaikan inflasi yang sangat tajam akibat *administered prices* juga terjadi pada tahun 2005. Kenaikan ini terutama terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM dalam negeri sehingga inflasi pada tahun 2005 mencapai *double digit* (17.11%) dibandingkan dengan 6.4% pada tahun sebelumnya. Kenaikan harga BBM juga terjadi pada 2008, tetapi dampaknya terhadap inflasi tidak setinggi tahun 2005. Hal ini tercermin dari kenaikan *administered prices* tahun 2008 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2005. Di samping kenaikan BBM, inflasi yang tinggi pada tahun 2008 juga terkait meningkatnya *volatile prices* sehingga inflasi *yoy* pada September 2008 mencapai 12.14%.

Perkembangan inflasi di Indonesia selama periode 1953 sampai dengan 2008 menyiratkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi selama periode tersebut tidak selalu sama.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Inflasi di Indonesia

Menurut Montiel (1989), inflasi di negara berkembang dapat bersumber dari beberapa faktor yang antara lain defisit anggaran belanja pemerintah. Defisit anggaran belanja pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, sebagaimana juga dibahas oleh Sargent dan Wallace (1981). Defisit anggaran pemerintah juga dapat mengakibatkan persoalan di neraca pembayaran dan selanjutnya mendorong dilakukannya depresiasi mata uang (Livitian and Piterman [1986]). Kajian mengenai keterkaitan antara defisit anggaran pemerintah dan laju inflasi tersebut juga dibahas dalam berbagai kajian, antara lain dalam Razin and Sadka (1987) dan Brunno and Fischer (1990). Sumber penyebab inflasi di negara berkembang lainnya, dari sisi permintaan, adalah kesenjangan perekonomian karena dipacu melebihi kapasitas yang tersedia (*output gap*). Hal tersebut, misalnya, terjadi di 13 negara Asia sebagaimana dibahas oleh Coe and McDermot (1997).

Di lain pihak, inflasi juga dapat disebabkan oleh faktor penawaran sebagaimana dibahas oleh Ball and Mankiw (1995). Mereka menyatakan bahwa adanya perubahan harga barang-barang tertentu (misalnya, harga bahan bakar minyak-BBM) dapat mengakibatkan melonjaknya laju inflasi.

Di samping faktor permintaan dan penawaran, inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi. Gordon (1997) menjelaskan determinan inflasi dari tiga sisi tersebut, yaitu permintaan, penawaran dan ekspektasi ("*the triangle model*"). Pentingnya ekpektasi dalam mempengaruhi inflasi juga dinyatakan sebelumnya oleh Chopra (1985). Semua faktor yang menyebabkan inflasi tersebut di atas akan digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan nflasi di Indonesia.

Inflasi di Indonesia, secara umum, dapat disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor baik dari sisi permintaan, penawaran, maupun dari ekspektasi. Kontribusi dari masing-masing faktor yang mempengaruhi inflasi tersebut tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi inflasi bisa berbeda dari waktu ke waktu.

Pada awal tahun 1960 sampai dengan pertengahan 1960-an, kenaikan laju inflasi lebih disebabkan dari sisi permintaan terkait dengan kebijakan defisit anggaran pemerintah. Pada waktu tersebut, pemerintah melakukan kebijakan defisit anggaran sehingga meningkatkan jumlah uang beredar dan pada gilirannya mendorong tingkat laju inflasi yang tinggi.

Laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang beredar juga terjadi pada awal 1970-an. Akan tetapi, peningkatan jumlah uang beredar pada periode ini tidak disebabkan oleh kebijakan defisit anggaran, tetapi terkait dengan meningkatnya harga minyak di pasar dunia. Pada awal tahun 1970-an harga minyak dunia meningkat sehingga penerimaan pemerintah dari minyak meningkat tinggi. Peningkatan pendapatan pemerintah dari minyak tersebut meningkatkan jumlah uang beredar sehingga mendorong inflasi meningkat tajam pada 1973 - 74.

Faktor yang mempengaruhi laju inflasi di Indonesia juga dapat disebabkan oleh depresiasi mata uang domestik¹⁸. Misalnya pada waktu pemerintah masih menganut sistem nilai tukar tetap, setiap pemerintah melakukan devaluasi (misalnya, pada tahun 1978, 1983, dan 1986), maka selalu diikuti dengan lonjak laju inflasi yang lebih tinggi¹⁹. Dampak nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia lebih besar melalui tekanan biaya (*direct passthrough*) daripada melalui *output gap* (*indirect passthrough*)²⁰. Depresiasi rupiah lebih meningkatkan tekanan inflasi di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dari sisi permintaan adalah permintaan musiman, misalnya, menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Perilaku musiman menjelang Idul Fitri akan menambah

18 Dampak nilai tukar terhadap inflasi dapat dilihat dari sisi permintaan (melalui *output gap*) dan penawaran (biaya).

19 Pengaruh nilai tukar terhadap inflasi dapat melalui *output gap* atau *indirect passthrough* (inflasi permintaan). Misalnya pengaruh depresiasi rupiah terhadap inflasi melalui *output gap* (*indirect passthrough*) berdampak mengurangi pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi tekanan laju inflasi. Akan tetapi, perubahan nilai tukar juga dapat mempengaruhi inflasi penawaran melalui harga barang secara langsung (*direct passthrough effect*).

20 Lebih detail mengenai dampak nilai tukar terhadap inflasi dapat dilihat di Astiyah (2005) dan Siswanto, Benny *et al* (2002).

ekstrainflasi tahunan. Berdasarkan survei mekanisme pembentukan harga pada tahun 2001, tambahan inflasi pada periode Idul Fitri terutama disebabkan oleh tingginya permintaan dan kecenderungan perilaku permintaan yang kurang elastis terhadap harga pada periode tersebut. Penyebab lainnya adalah faktor dorongan pesaing yang menaikkan harga. Sementara itu, keterbatasan pasokan bukan penyebab utama kenaikan harga pada periode tersebut²¹.

Inflasi di Indonesia juga dapat disebabkan dari sisi penawaran. Inflasi penawaran adalah kenaikan inflasi karena meningkatnya biaya *input* (*cost push inflation*). Selain karena kenaikan biaya, inflasi penawaran juga dapat disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah terhadap harga (*administered prices*) dan *supply shock*. Inflasi penawaran, selain disebabkan oleh meningkatnya biaya *input* dapat juga disebabkan oleh meningkatnya biaya upah. Kenaikan harga dari sisi biaya merupakan faktor penting yang menyebabkan inflasi di Indonesia.

Faktor lain yang mempengaruhi sisi penawaran adalah kebijakan yang diambil oleh instansi lain di luar Bank Indonesia, misalnya, kebijakan penghapusan subsidi pemerintah atau kebijakan kenaikan pajak yang mengakibatkan meningkatnya harga barang tersebut (*administered prices*). Misalnya kenaikan inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2005 (dan juga pada 2008) terutama terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran (*supply shock*) misalnya apabila terjadi musim kering yang mengakibatkan gagal panen, terjadinya bencana alam, gangguan distribusi sehingga distribusi tidak lancar serta adanya kerusuhan sosial yang berakibat terputusnya pasokan dari luar daerah. Gangguan tersebut akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan akan mengakitatnya kenaikan tingkat harga barang-barang tersebut secara umum dan pada akhirnya akan meningkatkan laju inflasi.

21 Hutabarat (2005), "Determinan Inflasi di Indonesia", BI, DKM, *Occasional paper*, Juni.

Inflasi di Indonesia selain disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran, inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi (inflasi ekspektasi). Ekspektasi tersebut terkait dengan ekspektasi masyarakat dalam pembentukan harga dan upah. Seperti telah dijelaskan, ekspektasi dapat bersifat adaptif (*backward expectation*) maupun ekspektasi berdasarkan informasi dan kebijakan ke depan (*forward expectation*). Berdasarkan survei, yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada pertengahan 2008, ekspektasi masyarakat mengindikasikan kecenderungan ekspektasi yang bersifat *forward looking*²². Pelaku usaha sektor finansial maupun masyarakat umum akan melakukan keputusan ekonominya berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi dan perkiraan inflasi ke depan. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap perkiraan inflasi ke depan.

Pengendalian Inflasi di Indonesia

Bank sentral mempunyai peran yang penting dalam mengendalikan inflasi, dan pada umumnya bank sentral akan berusaha untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang wajar. Pengendalian inflasi di Indonesia yang dilakukan dengan kebijakan moneter telah dilakukan sejak awal tahun 1950 an, terutama sejak diberlakukannya undang-undang tentang Bank Indonesia pada tahun 1953. Dengan undang-undang tersebut, secara resmi kepada Bank Indonesia diberi mandat untuk mengendalikan laju inflasi. Pengendalian inflasi yang secara formal dilakukan melalui kebijakan moneter tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu sejalan

22 Survei yang dilakukan oleh PPSK pada bulan Juni 2008 mengenai "Peran *Financial Deepening* dalam Pertumbuhan Ekonomi" mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi seperti faktor yang menentukan suku bunga dan faktor yang mempengaruhi pemberian kredit serta permintaan kredit lebih ditentukan oleh perkiraan ekonomi ke depan dan kebijakan BI rate 3 bulan yang akan datang daripada kondisi ekonomi yang lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan bahwa ekspektasi masyarakat bersifat *forward looking*. Ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi pada saat ini juga kemungkinan bersifat *forward looking* daripada *backward looking*.

dengan perubahan kondisi ekonomi dalam periode yang bersangkutan. Kebijakan moneter yang pada awalnya dilakukan secara langsung dengan pengendalian suku bunga atau kredit perbankan secara bertahap berubah menjadi kebijakan moneter yang lebih bersifat *market based*.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter secara langsung, mulai tahun 1974 sampai dengan Juni 1983, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter secara langsung mengendalikan baik suku bunga (kredit maupun simpanan) maupun ekspansi kredit perbankan. Sejak deregulasi di sektor keuangan dan perbankan pada tahun 1983, secara bertahap Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara tidak langsung, atau yang sering disebut sebagai kebijakan moneter yang lebih berorientasi pasar. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan menggunakan dan mengembangkan piranti-piranti moneter secara tidak langsung, misalnya, dengan memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang (SBPU).

Kebijakan moneter yang diarahkan untuk mengendalikan laju inflasi tersebut juga mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan undang-undang yang menjadi dasar kebijakan Bank Indonesia. Pada saat diberlakukannya UU No. 13 tahun 1968 yang berlaku sampai dengan tahun 1999, kebijakan moneter tidak hanya diarahkan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga ditujukan untuk mencapai tujuan makro-ekonomi lainnya, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Tujuan kebijakan moneter pada periode tersebut bersifat *multi objectives*. Dengan perkembangan kondisi ekonomi dan finansial serta *best practice* dari banyak negara lain²³, maka kecenderungan tujuan kebijakan moneter lebih mengarah pada *single objective* seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 23 tahun 1999.

23 Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara menganut *single objective* dalam kebijakan moneternya dengan memilih stabilitas tingkat harga sebagai tujuan akhir kebijakan moneter.

Dengan diberlakukannya UU No.23 tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan UU No.3 tahun 2004, tujuan kebijakan moneter lebih difokuskan pada sasaran tunggal (*single objective*) yaitu untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah, implementasi tujuan kebijakan moneter difokuskan untuk mencapai stabilitas internal, yaitu kestabilan tingkat harga yang diukur dengan tingkat inflasi yang rendah. Pemilihan stabilitas internal tersebut sejalan dengan *best practice* dari banyak negara. Di samping itu, pencapaian stabilitas internal juga akan membantu pencapaian stabilitas eksternal karena pencapaian stabilitas harga pada tingkat yang rendah dan tidak jauh berbeda dengan negara mitra dagang akan membantu tercapainya stabilitas eksternal. Dengan memilih stabilitas tingkat harga (stabilitas internal), maka juga akan tercapai stabilitas nilai tukar (stabilitas eksternal) dalam jangka panjang.

Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, ketika banyak bank sentral yang beralih untuk lebih memfokuskan tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai tingkat inflasi yang relatif rendah. Alasan yang mendasari perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. *Pertama*, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi variabel riil, seperti pertumbuhan *output* ataupun tingkat pengangguran. Alasan *kedua*, pencapaian inflasi rendah merupakan prasyarat bagi tercapainya sasaran makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan pada tingkat kapasitas penuh (*full employment*) dan penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. *Ketiga*, penetapan tingkat inflasi rendah sebagai tujuan akhir kebijakan moneter akan menjadi *nominal anchor* berbagai kegiatan ekonomi.

Sasaran inflasi yang digunakan adalah inflasi IHK. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya inflasi IHK sebagai target bank sentral. *Pertama*, IHK merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Seperti yang berlaku pada negara-negara lain institusi yang

bertugas mengumpulkan data statistik selalu memfokuskan sebagian besar sumber dayanya untuk menghasilkan data IHK yang *reliable* dibandingkan indeks harga lainnya, sehingga hasil pengukuran IHK selalu memiliki kualitas yang baik dan selalu tersedia tepat waktu. *Kedua*, inflasi IHK relatif lebih populer di masyarakat. Akan tetapi, dengan pemilihan inflasi IHK sebagai target akhir kebijakan moneter, maka terdapat banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, komponen inflasi IHK terdiri dari inflasi inti dan inflasi noninti. Inflasi noninti dipengaruhi oleh inflasi dari *administered prices* dan *volatile prices*. Inflasi yang berasal dari *administered prices* dan *volatile price* ini berada di luar kendali kebijakan moneter, hanya inflasi inti yang dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter.

Sementara itu, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berdasarkan undang-undang mendapat tugas untuk menjaga dan memelihara stabilitas mata uang Rupiah. Dengan penugasan tersebut, Bank Indonesia, sebagai bank sentral, merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga agar laju inflasi dapat dipertahankan pada tingkat yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas utama, yaitu i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan iii) mengatur dan mengawasi bank. Tiga tugas utama tersebut kelihatannya merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi dalam pelaksanaannya merupakan tiga tugas yang berkaitan erat untuk mencapai efektivitas kebijakan moneter.

Sebagaimana diketahui, perbankan merupakan lembaga yang sangat penting dalam mentransmisikan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan keadaan tersebut, sistem perbankan yang sehat merupakan prasyarat bagi efektivitas kebijakan moneter. Demikian pula dengan sistem pembayaran yang aman dan lancar. Sistem pembayaran dapat diibaratkan sebagai lalu lintas pembuluh darah dalam tubuh manusia. Apabila terdapat gangguan dalam sistem pembayaran, maka juga akan mengganggu sistem perbankan yang sehat, karena lalu lintas pembayaran dalam perekonomian akan

mengalami berbagai hambatan dan akan mengurangi efektivitas kebijakan moneter. Ketiga tugas tersebut mempunyai kaitan yang erat satu dengan lainnya untuk tercapainya kebijakan yang efektif.

Sementara itu, seperti telah didiskusikan pada bagian sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan, penawaran, dan ekspektasi. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia memiliki kemampuan terbatas, yaitu hanya dapat mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan. Namun demikian, kebijakan bank sentral yang kredibel juga akan mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang kredibel dapat menurunkan ekspektasi inflasi masyarakat dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat inflasi.

Kebijakan moneter mempunyai keterbatasan dalam mempengaruhi inflasi. Kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran. Tekanan inflasi dari sisi penawaran (seperti bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar) sepenuhnya berada di luar pengendalian kebijakan moneter Bank Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan koordinasi, kerja sama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah dengan berbagai kementerian yang terkait maupun pihak swasta.

Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah²⁴, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan yang antara lain dengan: i) operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah, termasuk intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah; ii) penetapan BI *rate* sebagai suku bunga acuan; dan iii) penetapan kebijakan cadangan wajib minimum bagi bank-bank. Pelaksanaan pengendalian moneter tersebut tidak hanya dilakukan melalui kegiatan bank-bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi juga melalui kegiatan bank-bank yang beroperasi berdasarkan syariah. Selain itu, untuk

24 Berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2004, sasaran akhir/target laju inflasi ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

mencapai target inflasi yang stabil dan rendah, Bank Indonesia juga melakukan analisis dan kajian yang komprehensif yang antara lain: i) mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter; ii) menganalisis dan mengkaji berbagai variabel informasi, iii) melakukan diskusi dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha, instansi pemerintah, perbankan, maupun akademisi; iv) mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor yang menyebabkan tekanan inflasi; dan v) memformulasikan respon kebijakan moneter.

Bank Indonesia juga diwajibkan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun yang antara lain memuat rencana kebijakan dan penetapan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. Pengumuman target dan sasaran moneter tersebut mengandung makna yang penting dalam rangka transparansi dan menunjukkan komitmen Bank Indonesia terhadap pengendalian laju inflasi. Bagi masyarakat, target dan sasaran moneter tersebut dapat menjadi arah mengenai kondisi perekonomian di masa mendatang sehingga mereka dapat melakukan perencanaan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Atas dasar hal tersebut, maka Bank Indonesia akan mengumumkan sasaran inflasi untuk jangka waktu antara 2-3 tahun ke depan. Sasaran tersebut akan diumumkan dalam suatu *range (band)* dengan titik tengah tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan terjadinya *random shocks* (tekanan-tekanan dari sisi penawaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya). Sementara itu, untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara komprehensif termasuk pentingnya pengendalian inflasi daerah.

Inflasi Daerah

Inflasi yang rendah merupakan kebutuhan semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi nasional merupakan cerminan dari inflasi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Inflasi daerah yang rendah dan stabil merupakan ujung tombak untuk tercapainya tingkat inflasi nasional yang rendah dan stabil. Bab ini akan membahas karakteristik inflasi daerah dan pengendalian inflasi daerah.

Karakteristik Inflasi Daerah

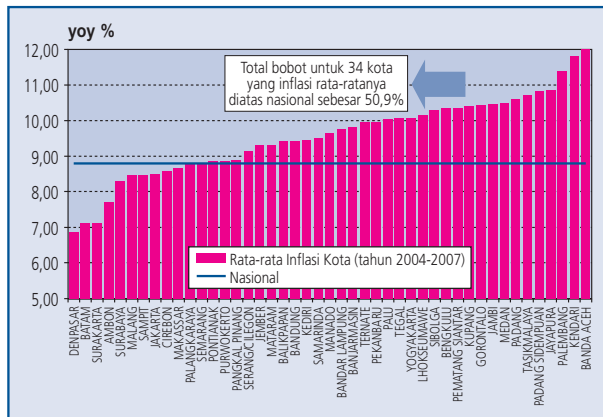
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi atau terdiri lebih dari 740 kota dan kabupaten. Banyaknya pulau dan perbedaan karakteristik daerah menjadikan setiap daerah mempunyai karakteristik perekonomian dan karakteristik inflasi yang kemungkinan besar berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di samping karakteristik inflasi yang berbeda, tingkat inflasi daerah juga beranekaragam. Ada daerah yang mempunyai tingkat inflasi lebih rendah daripada inflasi nasional, tetapi cukup banyak juga daerah yang mempunyai inflasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional.

Secara rata-rata selama tahun 2004 sampai dengan 2007, terdapat 34 kota (dengan total bobot sebesar 50,9%) dari 45 kota yang mempunyai tingkat inflasi lebih tinggi daripada inflasi nasional.

Salah satu sebab utama daerah-daerah yang mempunyai tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional adalah adanya gangguan dari sisi penawaran terutama karena terhambatnya distribusi.

Masalah distribusi merupakan persoalan yang signifikan dalam mempengaruhi inflasi di beberapa daerah di Indonesia. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) mengindikasikan bahwa

Grafik 6
Rata-rata Inflasi 34 kota



Sumber : BPS

Tabel 5
Inflasi 34 kota, 2004 - 2007

No	Kota	Bobot Kota	Inflasi Kota				Rata-rata Inflasi Kota (tahun 2004-2007)
			2004	2005	2006	2007	
1	SEMARANG	4,36	5,97	16,46	6,07	6,75	8,81
2	PONTIANAK	1,36	6,06	14,43	6,31	8,56	8,84
3	PURWOKERTO	0,69	6,32	14,54	8,45	6,15	8,86
4	PANGKAL PINANG	0,44	9,00	17,44	6,42	2,64	8,88
5	SERANG/CILEGON	2,18	6,40	16,11	7,67	6,31	9,12
6	JEMBER	0,92	6,24	16,86	6,84	7,25	9,30
7	MATARAM	1,07	6,61	17,72	4,17	8,76	9,32
8	BALIKPAPAN	1,31	7,60	17,28	5,52	7,27	9,42
9	BANDUNG	6,76	7,56	19,56	5,33	5,25	9,43
10	KEDIRI	0,86	6,38	16,84	7,78	6,85	9,46
11	SAMARINDA	1,55	5,64	16,65	6,50	9,18	9,49
12	MANADO	1,27	4,69	18,73	5,09	10,13	9,66
13	BANDAR LAMPUNG	2,25	5,22	21,18	6,03	6,58	9,75
14	BANJARMASIN	1,93	7,53	12,94	11,04	7,78	9,82
15	TERNATE	0,32	4,82	19,42	5,12	10,43	9,95
16	PEKANBARU	1,95	8,93	17,10	6,31	7,53	9,97
17	PALU	0,68	7,01	16,33	8,69	8,13	10,04
18	TEGAL	0,83	5,25	18,40	7,73	8,89	10,07
19	YOGYAKARTA	1,22	695	14,98	10,40	7,99	10,08
20	LHOKSEUMAWÉ	0,25	7,35	17,58	11,47	4,18	10,15
21	SIBOLGA	0,24	6,64	22,39	5,03	7,13	10,30
22	BENGKULU	0,76	4,67	25,23	6,52	5,00	10,35
23	PEMATANG SIANTAR	0,68	7,30	19,67	6,07	8,37	10,35
24	KUPANG	0,61	8,28	15,17	9,72	8,44	10,40
25	GORONTALO	0,46	8,64	18,56	7,54	7,02	10,44
26	JAMBI	1,31	7,24	16,50	10,66	7,42	10,46
27	MEDAN	5,98	6,65	22,91	5,96	6,42	10,49
28	PADANG	2,07	6,97	20,48	8,05	6,90	10,60
29	TASIKMALAYA	0,70	5,92	20,83	8,44	7,72	10,73
30	PADANG SIDEMPUAN	0,31	8,99	18,47	10,02	5,87	10,84
31	JAYAPURA	0,40	9,45	14,15	9,52	10,35	10,86
32	PALEMBANG	3,98	8,94	19,92	8,44	8,21	11,38
33	KENDARI	0,50	7,73	21,45	10,57	7,53	11,82
34	BANDA ACEH	0,66	6,97	41,11	9,54	11,00	17,16

faktor gangguan pasokan berpengaruh besar dalam mempengaruhi inflasi di daerah, faktor tersebut antara lain sebagai berikut²⁵.

- Adanya ketergantungan pasokan dari daerah lain dan manajemen *stock* yang belum optimal;
- Keterbatasan jalur distribusi;
- Produksi bahan makanan dan makanan relatif terbatas;
- Dalam mekanisme pembentukan harga beberapa komoditas pangan, peranan distributor dan pedagang pengumpul di daerah sangat dominan; dan
- Panjangnya rentang distribusi sehingga menjadikan tingginya biaya.

Untuk mencapai target inflasi yang rendah, peran daerah dalam pengendalian laju inflasi sangat penting karena bobot inflasi daerah dalam pembentukan inflasi nasional sangat besar. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan pada tingkat nasional, tetapi perlu pengendalian inflasi daerah yang melibatkan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait di daerah, dan pelaku usaha di daerah.

Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia

Upaya untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil terus dilakukan oleh Bank Indonesia dengan berbagai kebijakan dan koordinasi dengan berbagai pihak baik tingkat nasional maupun daerah. Bank Indonesia menyadari bahwa pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan dengan penggunaan kebijakan moneter semata, tetapi memerlukan kebijakan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak. Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik pada tingkat nasional maupun daerah merupakan kunci untuk tercapainya inflasi yang rendah. Inflasi yang rendah dan stabil

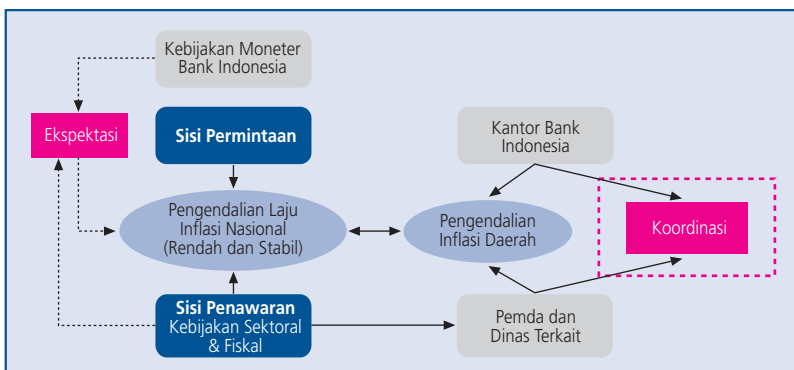
25 Hendar, "Antisipasi Dampak Krisis Keuangan Global pada Perekonomian Daerah dan Fokus Kegiatan Kajian Ekonomi Regional 2009", Bahan presentasi pada Forum Konsolidasi KER, Bandung, 26-27 November 2008

merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Pengendalian inflasi daerah mempunyai peran yang penting dalam mencapai inflasi yang rendah dan stabil karena inflasi nasional merupakan refleksi inflasi daerah. Inflasi daerah yang rendah dan stabil akan menjadikan inflasi nasional pada tingkat yang rendah dan stabil juga. Di samping itu, sumbangan inflasi daerah terhadap inflasi nasional sangat besar. Hal ini terjadi karena makin banyak kota yang dimasukkan dalam survei biaya hidup²⁶ untuk penghitungan inflasi sehingga peranan inflasi daerah dalam pembentukan inflasi nasional menjadi penting. Oleh karena itu, untuk mencapai inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil tidak dapat dilakukan dengan hanya melakukan pengendalian inflasi secara nasional, tetapi diperlukan peran aktif pemerintah dan pelaku usaha di daerah untuk mengendalikan inflasi.

Keterkaitan antara pengendalian inflasi secara nasional dan pengendalian inflasi daerah dalam mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil, secara sederhana, dapat digambarkan dalam diagram berikut.

Diagram 2
Pengendalian Inflasi daerah



Sumber: Modifikasi dari Hendar, "Antisipasi Dampak Krisis keuangan Global pada Perekonomian Daerah dan Fokus Kegiatan Kajian Ekonomi Regional 2009", Presentasi pada forum Konsolidasi KER, 26-27 November 2008, Bandung

26 Ada penambahan kota dalam survei biaya hidup tahun 2007 dibandingkan dengan survei biaya hidup tahun 2002.

Seperti telah didiskusikan sebelumnya, kebijakan moneter Bank Indonesia akan mempengaruhi tingkat inflasi dari sisi permintaan. Kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi inflasi dari sisi penawaran. Akan tetapi, kebijakan moneter, secara tidak langsung, dapat mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Dengan kata lain, kemampuan kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi nasional terbatas. Pengendalian inflasi dari sisi penawaran tidak dapat dilakukan dengan kebijakan moneter, melainkan diperlukan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral oleh masing-masing departemen terkait. Kebijakan dari sisi penawaran ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi ekspektasi masyarakat dalam pembentukan tingkat harga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi secara nasional memerlukan koordinasi dan atau kebijakan campuran (*policy mix*) karena faktor-faktor utama yang mempengaruhi inflasi seringkali merupakan gabungan/campuran baik dari sisi permintaan maupun penawaran serta ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia pusat yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan kantor Bank Indonesia (KBI), perwakilan Bank Indonesia di daerah, tidak melakukan kebijakan moneter. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh bank sentral lain di banyak negara di dunia. Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia tersebut akan mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan. Di lain pihak, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi tidak saja hanya dari sisi permintaan, sisi penawaran juga mempengaruhi inflasi. Untuk mengendalikan inflasi dari sisi penawaran diperlukan kebijakan yang tepat baik dari kebijakan fiskal maupun dari departemen terkait.

Sementara itu, dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, pemerintah daerah maupun dinas terkait di daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam melakukan kebijakan pengendalian inflasi dari sisi penawaran. Pengendalian inflasi daerah dapat dilakukan dengan kerja sama dan koordinasi antara Kantor Bank Indonesia (KBI) dengan pemerintah daerah dan dinas terkait. Dengan adanya upaya pengendalian inflasi baik secara nasional maupun daerah, diharapkan inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai.

Atas dasar argumen tersebut, sangat penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan pengendalian inflasi daerah. Untuk melakukan pengendalian inflasi daerah, Bank Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) telah melakukan *memorandum of understanding* dengan beberapa pemerintah daerah untuk membentuk tim atau penguatan tim jika sudah ada, guna pengendalian inflasi daerah. Beberapa KBI yang telah memformalkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengendalikan inflasi daerah pada 2008 adalah sebagai berikut.

Jenis Kerja sama	KBI	Kegiatan
MoU dalam pembentukan TPID	Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Bandung, Batam, Pekanbaru, Kendari, Kediri, Denpasar, Medan*)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertemuan dalam rangka koordinasi antarinstansi di daerah
<i>Focus Group Discussion</i>	Palembang, Manado, Bandar Lampung, Makassar, Padang, Palangkaraya, Tasikmalaya, Bengkulu, Palu, Jakarta, Ambon	<ul style="list-style-type: none"> ● Identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah ● Langkah-langkah penanggulangan ● Monitoring stok barang ● Imbauan

Sumber : Hendar, "Antisipasi Dampak Krisis keuangan Global pada Perekonomian Daerah dan Fokus Kegiatan Kajian Ekonomi Regional 2009" Presentasi pada forum Konsolidari KER, 26-27 November 2008, Bandung

Tujuan umum pembentukan atau penguatan tim pengendalian inflasi daerah adalah untuk menurunkan inflasi di daerah sehingga inflasi nasional juga turun pada tingkat yang rendah dan stabil. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Menurunkan laju inflasi daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan inflasi nasional yang rendah dan stabil;
2. Meningkatkan kerja sama dan komitmen kelembagaan di daerah dalam pengendalian inflasi di daerah; dan
3. Memantau dan mengendalikan inflasi di daerah dengan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dan dimonitor.

Inflasi

Seperti telah dibahas sebelumnya, inflasi yang berasal dari sisi penawaran cukup berpengaruh besar dalam pembentukan inflasi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, program kerja tim pengendalian inflasi di daerah lebih difokuskan pada pengendalian inflasi noninti dari sisi penawaran. Program kerja tersebut selaras dengan tim pengendalian inflasi nasional. Pengendalian inflasi daerah dari sisi penawaran antara lain dilakukan sebagai berikut.

1. Menjaga agar pasokan barang tersedia. Untuk itu, perlu terus ditingkatkan kelancaran distribusi sehingga permintaan masyarakat dapat terpenuhi.
2. Mengurangi seminimal mungkin dampak dari *administered prices* yang antara lain melalui peningkatan efisiensi dan mencari sumber energi alternatif.
3. Mempengaruhi ekspektasi inflasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat menuju ekspektasi inflasi yang rendah.

Dengan inflasi yang rendah dan stabil, pembangunan ekonomi jangka panjang dapat terwujud secara berkelanjutan dan daya beli masyarakat dapat meningkat karena pendapatan riil meningkat. Tujuan akhir dari kebijakan ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Agevli, Bijan. B and Mohsin S. Khan, "Inflationary Finance and the Dynamics of Inflation, in Indonesia: 1952-1972", *American Economic Review*, Vol. 67 No3, 1972.
- Astiyah, Siti, "Pemetaan dan Peran Relatif Jalur Transmisi Kebijakan Moneter Pasca Krisis:2000:01-2005:03", BI, Staf Paper, unpublished 2005
- Bank Indonesia, "Laporan Tahunan/Laporan Perekonomian Indonesia", Berbagai tahun terbitan.
- Bank Indonesia, DKM, "Panduan Inflasi Daerah", Tayangan pada berbagai pertemuan
- Boediono, "Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Makro", Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 1982
- Chopra, Ajai "The Speed of Adjutment of the Inflation Rate in Developing Countries, A Studies of Inertia", *IMF Staff Papers*, Vol. 32, 693-733, 1985
- Clarida, Richard, Gali Jordi., Mark Gertler, "The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective", *Journal of Economic Literature*, Vol.XXVII, December, 1999.
- Coe, David T. and C John McDermot, "Does the Gap Model Work in Asia", *IMF Staff papers*, Vol. 44, No.1, March, 1997
- Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer, "Moderate Inflation", *World Bank Economic Review*, No.7 , p.1-44, 1993
- Gordon, Robert J., "The Time-Varying NAIRU and its Implications for Economic Policy", *Journal of Economic Perspectives*, Vol.11 Number 1, Winter, 1997

Inflasi

- Hendar, "Antisipasi Dampak Krisis Keuangan Global pada Perekonomian Daerah dan Fokus Kegiatan Kajian Ekonomi Regional 2009", presentasi pada Forum Konsolidasi KER, Bandung 26-27 November, 2008
- Hutabarat, Akhliis. R., "The Distribution of CPI Inflation in Indonesia", paper presented in Workshop on CPI Inflation Characteristics and Measure in the SEACEN Countries, Kuala Lumpur, May 9-10, 2001 dan LPEM., "Laporan Final Studi Inflasi Regional", 2001
- Hutabarat, Akhliis. R., "Determinan Inflasi Indonesia", BI, Occasional Paper, Juni, 2005
- Hossain, Akhtar, "The Source and Dynamics of Inflation in Indonesia: An Empirical Investigation", 1952-2002, draft (2005).
- Humphrey, Thomas M., *Essays on Inflation*, Book for Business, 2001
- Livitian, Nissin, and S Piterman, "Accelerating Inflation and Balance of Payments Crisis, 1973-1984, in The Israeli Economy", Yoran Ben Porath (ed.), Cambridge, Havard University Press, p.320-46. 1986
- Mishkin, Frederic S., "The Cause of Inflation", *NBER Working Paper Series* No. 1453, National Bureau of Economic Research, September, 1984.
- Mishkin, Frederic, S., *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, 6 th Edition, Addison-Wesley, World Edition Series, 2001.
- Montiel, Peter, "Empirical Analisis of High Inflation Episode in Argentina, Brazil and Israel", *IMF Working Papers*, Vol. 36 No.3, September, p.527-549, 1989
- Razin, Assaf and Efrain Sadka (eds), *Economic Policy in Theory and Practice*, St Martin's Pers, New York, 1987
- Sargent and Wallace, "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic", *Federal Reserve Bank of Mineapolis Quartely Review*, Vol 5, p. 1-12. 1981
- Solikin dan Suseno, *Uang : Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Buku Seri Kebanksentralan, No.1, Bank Indonesia, Desember, 2002.

Solikin dan Suseno, *Penyusunan Statistik Uang Beredar*, Buku Seri Kebanksentralan, No.2, Bank Indonesia, Desember, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 2004.

Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/inflasi>

SERI KEBANKSENTRALAN BANK INDONESIA

1. Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
 2. Penyusunan Statistik Uang Beredar, oleh Solikin dan Suseno, Desember 2002.
 3. Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, oleh Ascarya, Desember 2002.
 4. Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi, dan Penerapan oleh F.X. Sugiyono, Desember 2002.
 5. Kelembagaan Bank Indonesia oleh F.X. Sugiyono dan Ascarya, Desember 2003.
 6. Kebijakan Moneter di Indonesia, oleh Perry Warjiyo dan Solikin, Desember 2003.
 7. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia, oleh Suseno dan Piter Abdullah, Desember 2003.
 8. Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, oleh Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Desember 2003.
 9. Organisasi Bank Indonesia, oleh Suarpika Bimantoro dan Syahrul Bahroen, Desember 2003.
 10. Instrumen Pengendalian Moneter, Operasi Pasar Terbuka, oleh F.X. Sugiyono, Mei 2004.
 11. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia, oleh Perry Warjiyo, Mei 2004.
 12. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, oleh Iskandar Simorangkir dan Suseno, Juli 2004.
 13. Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia, oleh Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, Juli 2004.
 14. Bank Syariah: Gambaran Umum, oleh Ascarya, Diana Yumanita, Januari 2005.
 15. Pasar Uang Rupiah: Gambaran Umum oleh Mahdi Mahmudy, Maret 2005.
 16. Sistem Akuntansi Bank Indonesia, oleh Abdul Rauf dan Haris Effendi, Juni 2005.
 17. Pengelolaan Cadangan Devisa di Bank Indonesia, oleh Dyah Virgoana Gandhi, Maret 2006.
 18. Paris Club, oleh Hilde Dameria. S, Felicia Virna I. Barus, Mei 2006.
 19. Penerapan Kebijakan Moneter dalam Kerangka *Inflation Targeting* di Indonesia oleh Abdul Kadir Masyhuri, Priyo Rokhadi Widodo, Guruh Suryani Rokhimah, November 2008
 20. Pinjaman Sindikasi Luar Negeri oleh Kusumaningtuti S.S., Felicia V.I. Barus, Deasy Ariyanti, Juli 2008
 21. Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Abdul Azis, A. Herani Rusland, Januari 2009
 22. Inflasi oleh Suseno, Siti Astiyah, Maret 2009
-



BANK INDONESIA

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 - Indonesia
<http://www.bi.go.id>